



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. H. Agus Salim Telp. 21000 – 21200 – 21313 – 22169

Fax. 21414 – 22169

PAINAN

Nomor : 460/195/DSPPrPA-PS/2019
Lamp : 1 (satu) berkas
Perihal : Undangan Verifikasi GAB dan GBS
Tahun 2020

Painan, 14 Juni 2019

Kepada Yth.
Sdr. Kepala Perangkat Daerah
Lingkup Kab. Pesisir Selatan
di

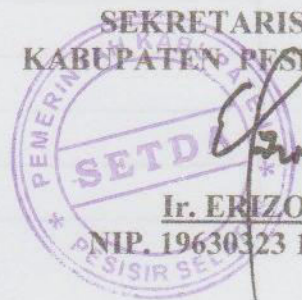
Tempat.

Bedasarkan hasil rapat pemantauan dan evaluasi PUG yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2019 di Gedung Bapedalitbang, maka perlu dilakukan verifikasi terhadap GAB dan GBS Perangkat Daerah Tahun 2020. Untuk itu diminta kepada Saudara untuk dapat menugaskan Sekretaris dan Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan hadir sesuai *Jadwal Terlampir bertempat di Gedung Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan.*

Sebagai bahan verifikasi masing – masing OPD membawa softcopy dan hardcopy GAP (Gender Analisis Phatway) dan GBS (Gender Badged Statement).

Demikian disampaikan untuk dapat dihadiri tepat waktu, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



Ir. ERIZON, MT

NIP. 19630323 199003 1 005

Tembusan disampaikan Yth :

1. Bpk. Bupati Pesisir Selatan sebagai laporan
2. Bappeda Provinsi Sumatera Barat di Padang .
3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov Sumbar
4. Arsip

DAFTAR JADWAL VERIFIKASI GAB DAN GBS TAHUN 2020

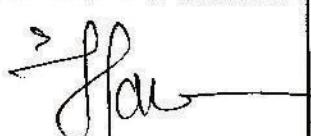
NO	TIM PPRG	PERANGKAT DAERAH	JADWAL
1	Bappeda Litbang	1. Inspektorat	Selasa , 18/06/2019
2	Dinas Sosial, PPrPA	2. Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Jam 9.00 Wib - sampai dengan selesai
3	Inspektorat	3. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
4	DPPKAD	4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			Rabu, 19/06/2019
1	Bappeda Litbang	6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jam 9.00 Wib - sampai dengan selesai
2	Dinas Sosial, PPrPA	7. Dinas Kesehatan	
3	Inspektorat	8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
4	DPPKAD	9. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
			Kamis, 20/06/2019
1	Bappeda Litbang	10. Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian	Jam 9.00 Wib - sampai dengan selesai
2	Dinas Sosial, PPrPA	11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
3	Inspektorat	12. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
4	DPPKAD	13. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
			Jum'at, 21/06/2019
1	Bappeda Litbang	14. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jam 9.00 Wib - sampai dengan selesai
2	Dinas Sosial, PPrPA	15. Dinas Lingkungan Hidup	
3	Inspektorat	16. Dinas Perhubungan	
4	DPPKAD	17. Badan Pendapatan	

**LEMBARAN VERIFIKASI GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) DAN GENDER BADGET STATEMENT (GBS)
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020**

Instansi : Inspektorat.

Kegiatan : Review Dokumen Perencanaan dan Laporan

Tanggal : 10 - 6 - 2019

No	Tim Driver PPRG	Tanda Tangan	Keterangan
1	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Nama : <i>Zuhair Pk</i> NIP : <i>196603051992031006</i>		
2	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Nama : <i>Fuira Notita SE</i> NIP : <i>197811242007012004</i>		
3	Inspektorat Nama : <i>YETRIAL, SH, MM / Irma Yulia Permana</i> NIP :		
4	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Nama : <i>NESVITA Zuhra S.G, M.S</i> NIP : <i>198207062005012010</i>		

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

PD :Inspektorat

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator
Program : Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH. Kegiatan : Review Dokumen Perencanaan dan Laporan Tujuan : Untuk menjamin agar penyelenggaraan Pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan rencana dan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.	- Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan. - Jumlah Perangkat Daerah sebanyak 45 - Reviu RPJMD, Reviu RKPD, Rivi Renja Perangkat Daerah, Reviu RKA SKPD, Reviu Lap.Keuangan Daerah (LKD), Reviu PPRG. - Data kepegawaian Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019 - Jumlah PNS Inspektorat sebanyak 45 orang terdiri dari Pejabat Struktural 9 orang, Pejabat Fungsional 27 orang dan 9 orang fungsional umum. - Jumlah Tim Pemeriksa sebanyak 27 orang yang terdiri dari: 16 orang laki-laki dan 11 orang perempuan.	Akses : Keterbatasan waktu dalam pemeriksaan reviu. Partisipasi : Keterbatasan Ruang Gerak bagi perempuan dalam melaksanakan tugas pemeriksaan. Kontrol : Dalam hal pengambilan keputusan lebih didominasi oleh keputusan pimpinan. Manfaat : Tidak adanya jaminan kesesuaian data atau angka yang disajikan dalam dokumen yang direviu.	- Belum maksimalnya pemahaman pemeriksa terhadap Pelaksanaan Reviu. - Keterbatasan jumlah SDM pemeriksa untuk memfasilitasi pelaksanaan reviu. - Profesionalisme tenaga pemeriksa masih belum merata baik dari segi kapasitas dan kompetensinya - Belum proporsional tingkatan jabatan fungsional yang tersedia dikaitkan dengan kebutuhan operasional pelaksanaan pemeriksaan - Sistem Pengendalian Intern belum berjalan sebagaimana mestinya sehingga kelemahan, hambatan serta penyimpangan dan	- Tidak adanya formasi PNS untuk Tenaga Fungsional Pemeriksa.	- Untuk menjamin agar penyelenggaraan Pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan rencana dan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.	- Reviu atas Dokumen Perencanaan dan Laporan. - Mengajukan usulan formasi PNS tenaga Fungsional Pemeriksa ke BKPSDM - Pengembangan dan peningkatan wawasan aparatur pengawasan	- Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan. - Jumlah Perangkat Daerah sebanyak 45 - Pemeriksaan Reviu RPJMD, Reviu RKPD, Rivi Renja Perangkat Daerah, Reviu RKA SKPD, Reviu Lap.Keuangan Daerah (LKD), Reviu PPRG, - Data kepegawaian Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019 - Jumlah Pegawai 45 orang terdiri dari Pejabat Struktural 9 orang, Pejabat Fungsional 27 orang dan 9 orang	Kegiatan Reviu Dokumen Perencanaan dan Laporan Input Rp10 Output Laporan reviu dan atur

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
			pelanggaran belum dapat dicegah secara dini - Belum pahamnya konsep gender oleh pengelola kegiatan				fungsiional umum. - Jumlah Tim Pemeriksa sebanyak 27 orang yang terdiri dari: 16 orang laki-laki dan 11 orang perempuan.	

Painan, 18 Juni 2019

Inspektur,

**Drs. YESPI NAWIARSIH**

Pembina Tk.I.

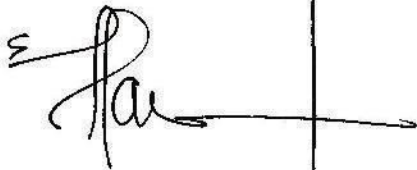
NIP. 19681017 198903 1 003

**LEMBARAN VERIFIKASI GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) DAN GENDER BADGET STATEMENT (GBS)
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020**

Instansi : Bapedalitbang

Kegiatan : Penyelenggaraan Musrembang Pengusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Tanggal : 10 - 6 - 2019

No	Tim Driver PPRG	Tanda Tangan	Keterangan
1	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Nama : <i>Zuhar Fau</i> NIP : <i>196603051992031006</i>		
2	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Nama : <i>Fuad Nofitars E</i> NIP : <i>1978112420072007</i>		
3	Inspektorat Nama : <i>Yefren Ju Man / Rina Yulia, ST</i> NIP :		
4	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Nama : <i>NESVITA ZIKRA S.Si.M.H</i> NIP : <i>198207062005012010</i>		

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : Bapedalitbang

HASIL VERIFIKASI

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator
Program : Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan : Penyelenggaraan Musrenbang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tujuan : Terselenggaranya Musrenbang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	- Dasar penyusunan perencanaan pembangunan daerah yakni UU No 25 tahun 2004 dan permendagri no 54 tahun 2010, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, mengamanatkan bahwa penyusunan dokumen perencanaan menggunakan pendekatan top down, bottom up, teknokratik, politis, aspiratif. - Jumlah Penduduk Pesisir Selatan tahun 2018 sebanyak 508.691 jiwa terdiri dari laki-laki 257.040 jiwa dan perempuan 251.651 jiwa - Jumlah Disabilitas Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2018 sebanyak 1531 orang. - Luas Wilayah Kab. Pessel 5.749,89 Km	Akses - Undangan tidak menjangkau semua komponen masyarakat - Informasi pelaksanaan musrenbang minim - E-planning kaku dan belum mengakomodir semua komponen masyarakat Partisipasi - Materi yang disajikan dan cara penyampaian materi belum komunikatif untuk seluruh komponen yang di undang. Kontrol - Musrenbang hanya sebatas memenuhi amanat dalam penyusunan dokumen perencanaan Manfaat - Porsi pengalokasian anggaran lebih banyak ditentukan oleh pendekatan top down dan	- Minimnya pelaksanaan sosialisasi, informasi dan edukasi kepada komponen masyarakat terkait penyusunan perencanaan. - Waktu pelaksanaan kegiatan sangat terbatas dan tidak sebanding dengan substansi yang dibahas. - Kurangnya pemahaman Pengelola kegiatan terhadap pelaksanaan kegiatan Musrenbang yang responsif gender	- Tidak semua kelompok masyarakat memiliki alamat yang jelas untuk dihubungi - Kurangnya minat masyarakat untuk mengikuti musrenbang. - Pelaksanaan kegiatan musrenbang lebih mengutamakan seremonial dari pada substansi pembahasan - Tingkat kehadiran pemangku kebijakan/kepala SKPD minim. - Masih minimnya informasi yang dimiliki masyarakat terkait dengan prioritas	Terselenggaranya Musrenbang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	- Penyelenggaraan Musrenbang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah. - Pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Pesisir Selatan. - Implementasi sistem perencanaan . - Bimbingan tekni peraturan perundang-undangan. - Penyusunan RKPDP Tahun 2020	- Jumlah Penduduk Pesisir Selatan tahun 2018 sebanyak 508.691 jiwa terdiri dari laki-laki 257.040 jiwa dan perempuan 251.651 jiwa - Jumlah Disabilitas Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2018. - Luas Wilayah Kab. Pessel 5.749,89 Km - Pelaksanaan musrenbang tahun 2018 dan 2019 peserta yang hadir 300 orang. - Komposisi jenis kelamin 215 laki-laki dan perempuan 85 - Komposisi elemen yang hadir tahun 2019 pemerintah 247, swasta 53 masyarakat (ormas 49, LSM 4)	Kegiatan 1; Penyelenggaraan Musrenbang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Input; Rp. 150.000.000 Output: - Terselenggaranya proses perencanaan dan aspiratif dan partisipatif Outcome; Tersedianya RKPDP sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kegiatan 2; Pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Pesisir Selatan Input; Rp. 83.616.075 Output; Pelaksanaan

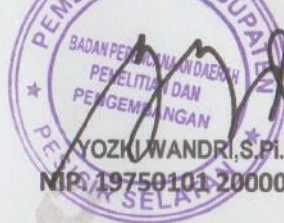
Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
	-Pelaksanaan musrenbang tahun 2018 dan 2019 peserta yang hadir 300 orang. -Komposisi jenis kelamin 215 laki-laki dan perempuan 85 -Komposisi elemen yang hadir tahun 2019 pemerintah 247, swasta 53 masyarakat (ormas 49, LSM 4) -Komposisi peserta dari kelompok umur anak-anak (0-18 tahun) 0 pemuda (18 – 30 th) 13 dewasa (30 – 60 th) 250 lansia (60 th ke atas) 37	politik.		pembangunan dan kewenangan masing-masing pemerintah daerah - Domain politik dalam penyusunan penganggaran lebih dominan			-Komposisi peserta dari kelompok umur anak-anak (0-18 tahun) 0 pemuda (18 – 30 th) 13 dewasa (30 – 60 th) 250 lansia (60 th ke atas) 37	Musrenbang responsive Gender Outcome; Terwujudnya RKPD yang mengakomodir gender

Catatan :

- Langkah ke 2, berisikan dasar hukum dan fakta atau fenomena yang terjadi
- Langkah ke 3, bias manfaat

Painan, 18 Juni 2019

Kepala Bappedalitbang Kab. Pessel



 YOZKI WANDRI, S.Pi.M.Si.

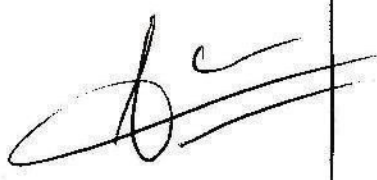
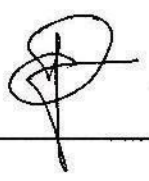
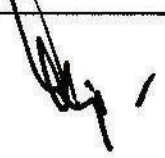
 NIP. 19750101 200003 1 003

**3ARAN VERIFIKASI GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAB) DAN GENDER BADGET STATEMENT (GBS)
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020**

Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Tanggal : 18 - 6 - 2019

No	Tim Driver PPRG	Tanda Tangan	Keterangan
1	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Nama : <u>Zuharnu</u> NIP : <u>196803051992031000</u>		
2	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Nama : <u>DEJRI LAJUMIDARTI, PPA</u> NIP : <u>19731224 200801 2 006</u>		
3	Inspektorat Nama : <u>YEFRIAL, ST, MM</u> NIP : <u>19671020 198003 1 007</u>		
4	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Nama : <u>NESVITA 24RA.S.S.M.S</u> NIP : <u>19820706 200501 2 010</u>		

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

: BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

HASIL VERIFIKASI TIM PPRG

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Kebijakan/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base- Line)	Indikator Gender
Program dan Aparatur	Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan kantor baru yang berdiri pada tahun 2011	- Akses : - masih kurangnya toilet perempuan berdasarkan jumlah pegawai dan - belum tersedianya toilet perempuan yang sesuai standar	- Belum dialokasikan anggaran rumah tangga sebagai skala prioritas	- Pengalokasian Anggaran belum mempertimbangkan kebutuhan sarana dan prasarana kantor - Toilet yang ada dimanfaatkan oleh 2 OPD yang Berdekatan (Kominfo)	- Tersedianya sarana atau Fasilitas Perlengkapan Gedung Kantor yang memadai	- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya khususnya Gantungan Tas, Westafel, Kaca Rias Pegangan Tangan (Handle) dan tong sampah untuk Toilet Perempuan Lingkup Badan Pengelola Keuangan Daerah.	Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan kantor baru yang berdiri pada tahun 2011	- Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, - Input : Rp. (3.000.000,-)
Luas Gedung Kantor Badan Pengelola keuangan Daerah 2.400 M2.		- Partisipasi : Tingginya permintaan kebutuhan PNS perempuan terhadap Perlengkapan Alat Rumah Tangga Lainnya untuk Toilet khususnya Gantungan Tas, Westafel, Kaca Rias Pegangan Tangan (Handle) dan tong sampah				- Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor - Pengadaan 3 unit toilet perempuan sesuai standard.	Luas Gedung Kantor Badan Pengelola keuangan Daerah 2.400 M2.	- Output : Pengadaan Perlengkapan toilet perempuan sebanyak 3 unit sesuai standar
Jumlah Perlengkapan Alat Rumah Tangga Lainnya seperti Gantungan Tas, Westafel, Kaca Rias Pegangan Tangan (Handle) dan tong sampah di Lingkup Badan Pengelola Keuangan Daerah sebanyak 17 unit.							Jumlah Perlengkapan Alat Rumah Tangga Lainnya seperti Gantungan Tas, Westafel, Kaca Rias Pegangan Tangan (Handle), dan tong sampah di Lingkup Badan Pengelola Keuangan Daerah sebanyak 17 unit.	- Outcome : Tersedianya fasilitas Kantor yang Memadai khususnya Toilet Perempuan Lingkup Badan Pengelola Keuangan Daerah

	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base- Line)	Indikator Gender
	- Jumlah PNS Lingkup Badan Pengelola Keuangan Daerah 35 Orang - Jumlah PNS Laki-laki sebanyak 14 Orang Perempuan 21 Orang - Jumlah Toilet 5 (1 unit toilet kepala, 2 unit toilet laki-laki 2 unit toilet perempuan,)	- Kontrol : Kurangnya Perencanaan dalam pembangunan gedung kantor. - Manfaat : belum maksimalnya manfaat toilet perempuan yang ada.					- Jumlah PNS Lingkup Badan Pengelola Keuangan Daerah 35 Orang	-

Painan, 02 Juli 2019

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah

Kabupaten Pesisir Selatan



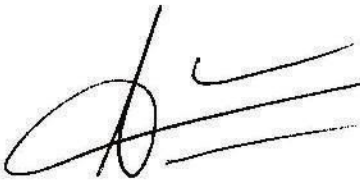
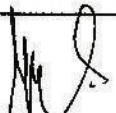
NIP. 19700608 200212 1*003

**LEMBARAN VERIFIKASI GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) DAN GENDER BADGET STATEMENT (GBS)
KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2020**

Instansi : BPPD Kab. Pes-sel

Kegiatan : 1. pengimbangan program pengurangan resiko bencana berbasis masr. dan mas.
2. Sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana bagi kelompok perempuan

Tanggal : 20 - Juni - 2019

No	Tim Driver PPRG	Tanda Tangan	Keterangan
1	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Nama : Zubayr NIP : 19660305 197213 1000		
2	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Nama : 1. DESRI LAUSMI Berti 2. Julia Nofita, SE NIP :		
3	Inspektorat Nama : 1. Irma Nila NIP :		
4	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Nama : Anawati NIP : 19830112 201001 2 422		

Matrik Gender Analysis Pathway (GAP)

SKPD : BPBD KABUPATEN PESIR SELATAN

PROGRAM : 1.19.1.19.05.25. - Program Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat dan Pemangku Lainnya dalam Pengurangan Risiko Bencana.

KEGIATAN : 1.19.1.19.05.25.02 - Pengembangan Program Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Masyarakat dan Nagari Tangguh

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER						
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program : Peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat dan pemangku lainnya dalam pengurangan resiko bencana Kegiatan : pengembangan program pengurangan resiko bencana berbasis masyarakat dan nagari tangguh	Data Jumlah penduduk pesisir selatan : Tahun 2018 yaitu 513.183 (jiwa), laki-laki jumlah 260.112 (jiwa) dan Perempuan jumlah 253.071 (jiwa). Jumlah nagari di pesisir selatan. 182 Nagari/Desa Jumlah kelompok siaga bencana Di Nagari 182 x 25 Orang = 4.550 personil (terpilih Perempuan dan Laki-laki) Kelompok Siaga Bencana Nagari (KSBN) yang sudah dibentuk 8 Nagari x 25 orang = 200 personil jadi yang	Akses : - Minimnya akses informasi terhadap kelompok siaga bencana - Masih kurangnya tenaga Satgas yang terlatih. - Masih kurangnya posko dan personil tenaga satgas di kabupaten. Partisipasi : - Belum seluruhnya masyarakat memahami tentang pentingnya pengurangan resiko bencana.	- Keterbatasan kewenangan BPBD - SDM yang terlatih masih kurang - Masih kurangnya sarana dan prasarana pelatihan tanggap darurat bencana.	- Terbatasnya waktu anggota KSBN perempuan dalam melaksanakan pelatihan - KSBN yang sudah dilatih kurang menyebarkan informasi ke masyarakat akan pentingnya pengurangan resiko bencana. - Peserta yang sudah dilatih belum bias	Mengurangi resiko bencana	- Pelatihan KSBN sebanyak 4350 Personil. - Melaksanakan koordinasi - Sosialisasi ke pada KSBN dan Masyarakat - Pengadaan Sarana dan Prasarana alat pelatihan	Data Jumlah penduduk pesisir selatan : Tahun 2018 yaitu 513.183 (jiwa), Laki-laki Jumlah 260.112 (jiwa) dan Perempuan Jumlah 253.071 (jiwa). Jumlah nagari di pesisir selatan. 182 Nagari/Desa Jumlah kelompok siaga bencana Di Nagari 182 x	Input : Rp. 250.000.000 Output : Terlatihnya 10 KSBN Outcome : 10 KSBN yang Terlatih dalam menghadapi pengurangan resiko bencana

11 jiwa. (Data 3 Tahun Terakhir)
 Sarana dan prasarana
 12 unit (12.331 jiwa, Banir 24...)

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER					Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi		
Tujuan : Mengurangi resiko bencana	belum terlatih berjumlah 4350 Personil. Peta daerah rawan bencana : - Tsunami : - Banjir : - Kebakaran Hutan - Longsor - Gempa - Abrasi Pantai - Angin Puting Beliung Data kerentanan : Tsunami : - 24.598 (Jiwa) Laki-laki, - 35.246 (Jiwa) perempuan Banjir :64.342 (Jiwa) Longsor :12.331 (Jiwa) Data korban bencana data tiga tahun terakhir sebelumnya : Tsunami : 0 laki-laki,0 perempuan Banjir : 34 Jiwa Longsor :11 Jiwa Sarana prasarana untuk kesiapsiagaan bencana : - Perahu karet.12	Control : - Silabus dan metode pelatihan sudah baku, sehingga peserta tidak ada ruang untuk menyampaikan aspirasinya. Manfaat : - Hasil pelatihan belum bisa dirasakan manfaatnya		dipastikan akan selalu ada di daerah tersebut			25 Orang = 4 550 personil (terpilah Perempuan dan Laki-laki) Kelompok Siaga Bencana Nagari (KSNB) yang sudah dibentuk 8 Nagari x 25 orang = 200 personil jadi yang belum terlatih berjumlah 4350 Personil. Peta daerah rawan bencana : - Tsunami : - Banjir : - Kebakaran Hutan - Longsor - Gempa - Abrasi Pantai - Angin Puting Beliung Data kerentanan : Tsunami :	

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER						
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
							13.perempuan 4 posko satgas di empat kecamatan Jumlah Satgas yang terlatih : 20 laki-laki,2 perempuan (Minimal tiga tahun terakhir))	



Kepala Pelaksana ,

HERMAN BUDIARTO

NIP. 196701031992031010

HASIL VERIFIKASI

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

SKPD :BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

PROGRAM : 1.19.1.19.05.23. - Program Kesiapsiagaan

KEGIATAN : 1.19.1.19.05.23.18 - SosialisasiPenguranganResikoBencanaBagiKelompokPerempuan di KabupatenPesisir Selatan

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
GAP								
Kegiatan: Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana Bagi Kelompok Perempuan di Kabupaten Pesisir Selatan Tujuan: Menyebarluaskan informasi kebencanaan kepada perempuan – perempuan di Kabupaten Pesisir Selatan.	Kabupaten Pesisir selatan Provinsi Sumatera Barat memiliki: - Jumlah penduduk Tahun 2018 yaitu 513.183(jiwa).(Terdiri 260.112 (jiwa) laki-laki 260.112 (jiwa) dan 253.071 (jiwa)perempuan) - Luas daratan 2.297,30 km2 dan luas perairan laut ±18.500 km2, dengan panjang garis pantai 243..000 km, serta memiliki 275 buah pulau besar dan kecil. - Memiliki 15 Kecamatan terdiri dari 13 Kecamatan di pesisir pantai dan 2	Akses: Masih terbatasnya akses masyarakat bagi perempuan terhadap informasi kebencanaan baik melalui media cetak, elektronik maupun sosialisasi disebabkan penyebaran informasi yang masih terbatas. Partisipasi: - Kurangnya partisipasi masyarakat perempuan dalam kegiatan penyebaran informasi dan kegiatan kesiapsiagaan menghadapi bencana karena terbatasnya pengetahuan	- Keterbatasan BPBD dalam melakukan sosialisasi terhadap perempuan karena dalam setahun hanya dapat di lakukan sosialisasi untuk 100 orang.	Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan peran perempuan dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana.	Menyebarluaskan informasi kebencanaan kepada perempuan – perempuan di Kabupaten Pesisir Selatan.	- Sosialisasi Kebencanaan dengan peserta perempuan. - Pembentukan Kelompok Perempuan Siaga Bencana. - Simulasi kebencanaan terhadap kelompok perempuan.	Kabupaten Pesisir selatan Provinsi Sumatera Barat memiliki: - Jumlah penduduk Tahun 2018 yaitu 513.183 (jiwa.), (Terdiri 260.112 (jiwa) laki-laki dan 253.071 (jiwa) perempuan) - Luas daratan 2.297,30 km2 dan luas perairan laut ±18.500 km2, dengan panjang garis pantai	Input: Rp. 150.000.000,- Output: Terlaksananya Sosialisasi terhadap 100 orang perempuan dewasa Outcome: Bertambahnya pengetahuan kebencanaan bagi 100 orang perempuan.

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
	kecamatan ditepi bukit. - Sumberdaya air yang melimpah dengan jumlah sungai sebanyak 20 buah, bermuara di pantai barat sumatera. - Potensi bencana ada 13 yaitu: 1. Banjir 2. Gempa bumi 3. Gempa bumi dan tsunami 4. Kebakaran permukiman 5. Angin topan 6. Banjir dan tanah longsor 7. Tanah longsor 8. Gelombang pantai dan abrasi 9. Kebakaran hutan dan lahan 10. Kecelakaan transportasi 11. Konflik Sosial 12. Kekeringan 13. Kejadian luar biasa (KLB)	penanggulangan bencana Kontrol: - Keterbatasan tenaga teknis dalam penyebaran informasi tentang pengurangan resiko bencana - Manfaat: Masyarakat perempuan kurang memperoleh manfaat Hal ini disebabkan karena kurang mencukupinya penyediaan informasi tentang kebencanaan.				- Rapat-rapat kebencanaan dinagari/kecamatan dalam peningkatan keisapsiagaan kelembagaan bencana di kecamatan.	243..000 km, serta memiliki 275 buah pulau besar dan kecil. - Memiliki 15 Kecamatan terdiri dari 13 Kecamatan di pesisir pantai dan 2 kecamatan ditepi bukit. - Sumberdaya air yang melimpah dengan jumlah sungai sebanyak 20 buah, bermuara di pantai barat sumatera. - Potensi bencana ada 13 yaitu: 14. Banjir 15. Gempa bumi 16. Gempa bumi dan tsunami	

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
	- 12 Kecamatan daerah rawan tsunami yaitu: Kecamatan Koto XI Tarusan, IV Jurai, Bayang, Batang Kapas, Sutura, Lengayang, Ranah Pesisir, Linggo Sari Baganti, Air Pura, Pancung Soal, Lunang dan Silaut.						17. Kebakara n permukim an 18. Angin topan 19. Banjir dan tanah longsor 20. Tanah longsor 21. Gelomban g pantai dan abrasi 22. Kebakara n hutan dan lahan 23. Kecelakaa n transporta si 24. Konflik Sosial 25. Kekeringa n 26. Kejadian luar biasa (KLB)	
							12 Kecamatan daerah rawan	

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
							tsunami yaitu: Kecamatan Koto XI Tarusan, IV Jurai, Bayang, Batang Kapas, Sutura, Lengayang, Rana h Pesisir, Linggo Sari Baganti, Air Pura, Pancung Soal, Lunang dan Silaut	

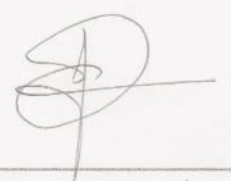
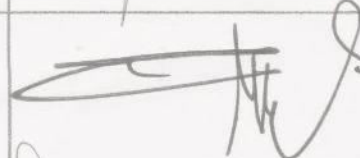
Kepala Pelaksana,

IR. H. IFRMAN BUDIARTO
 NIP. 196701031992031010

✓

**LEMBARAN VERIFIKASI GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAB) DAN GENDER BADGET STATEMENT (GBS)
KABUPATEN PESIRIR SELATAN TAHUN 2020**

Instansi : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 Kegiatan : 1. Pendampingan dan Pembinaan KUBE Fakir Miskin
 2. Pembinaan kelembagaan PUG dan Pengusunan Anggaran Responsif Gender
 Tanggal : 10-6-2018.

No	Tim Driver PPRG	Tanda Tangan	Keterangan
1	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Nama : Zuhar p NIP : 1966030519920311008		
2	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Nama : DESRI LAUSMIDARTI NIP : 197312242008012006		
3	Inspektorat Nama : YFFRANCIAH, MM IRMA YULIA NIP :		
4	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Nama : NESVITA ZUKRA, S.Si, M.Si NIP :		

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

PD : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

ASIL VERIFIKASI

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Kebijakan : Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial Program : Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Dat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Kegiatan : Pendampingan dan Pembinaan KUBE	Angka Keluarga Miskin Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 (PSDA) berjumlah : 26.367 KK Miskin P : 6.795 L :19.572 Jumlah RTSM yang telah dibantu 200 KK (20 KUBE), 1 KUBE 10 KK Mayoritas anggota KUBE saat ini adalah perempuan L: 0	Akses: - Adanya Ketidaksetaraan Gender dibidang kesejahteraan sosial khususnya dalam hal pelayanan kepada KK Miskin laki-laki untuk mendapatkan bantuan KUBE - Informasi Laki- laki untuk mendapatkan bantuan KUBE masih rendah.	1. Kurangnya pemahaman Pelaksana Kegiatan tentang PUG. 2. Lemahnya komitmen stakeholders untuk mendukung PUG	-Persyaratan memperoleh bantuan belum responsive gender.	Mewujudkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Masyarakat Miskin baik laki-laki maupun perempuan dalam pemberian bantuan KUBE	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan KUBE	Angka Keluarga Miskin Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 (PSDA) berjumlah : 26.367 KK Miskin P : 6.795 L :19.572 Jumlah RTSM yang telah dibantu 200 KK (20 KUBE), 1 KUBE 10 KK Mayoritas	Input: Rp.93.991.480,- Output : Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi KUBE Outcome: Meningkatnya pelayanan prog KUBE yang responsive gen

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Fakir Miskin Output : terbanyaknya 20 KUBE Fakir Miskin Tujuan : mewujudkan layanan kesejahteraan sosial Bagi PMKS	- P: 200	Partisipasi : Belum ada kepesertaan laki-laki dalam KUBE. Kontrol : Program Prioritas dari kementerian (Dana Dekon) lebih mengutamakan perempuan. Manfaat : KUBE lebih dominan dinikmati perempuan					anggota KUBE saat ini adalah perempuan L: 0 P: 200	

Painan, 19 Juni 2019
 Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
 dan Perlindungan Anak
 Kabupaten Pesisir Selatan

ZULFIAN APRIYANTO, SH, M.Si
 NIP. 19651116 198602 1 002

GAP (Gender Analysis Pathway)

SKPD: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan 2020

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
PROGRAM : Penguatan kelembagaan pengarusutamaan Gender dan Anak KEGIATAN: Pembinaan kelembagaan PUG dan penyusunan anggaran responsif gender TUJUAN: Meningkatkan kompetensi para perencana yang tergabung dalam tim focal point dalam menerapkan	Data Pembuka Wawasan Berdasarkan Surat Keputusan Bupati no : 460 /81/Kpts/BPT-PS / 2019 Tentang Pembentukan kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender dan Focal Point di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir selatan Tahun 2019, Komponen perencanaan terdiri dari 30 SKPD dan 15 Kecamatan yang tergabung Pokja PUG dan focal point Kab.Pessel dengan anggota	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Ke Depan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-lina)	Indikator Gender
		Akses: - Akses untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang PUG serta fungsi focal point dalam POKJA PUG melalui sosialisasi maupun media lainnya sangat kurang - Menganggap PUG hanyalah bentuk program yang hanya merupakan urusan	- Sebagian besar anggota focal point dan perencana program di SKPD belum memahami, dan mendapatkan pembekalan ilmu tentang PPRG - Sering terjadi rotasi dan mutasi SDM sebagai anggota focal point pada SKPD	- Koordinasi dan integrasi antar lintas SKPD dalam melaksanakan PPRG masih lemah. - Belum sinerginya anggota TAPD dalam memahami PPRG - Belum seluruh elemen masyarakat disosialisasi	Meningkatkan kompetensi para perencana yang tergabung dalam focal point dalam menerapkan PPRG di masing-masing SKPD	- Advokasi dan sosialisasi kepada semua Pokja PUG dan Focal Point terkait PUG dalam Pembangunan - Advokasi dan sosialisasi kepada semua pimpinan SKPD dan stakehold	Komponen perencanaan dari 30 SKPD dan 15 Kecamatan yang tergabung Pokja PUG dan focal point Kab.Pessel yang berdasarkan Kep. Bupati no : 460 /81/Kpts/BPT-PS / 2019 berjumlah 45 OPD dan 148 anggota Focal Point dari seluruh OPD	In Put : Rp. 114,807,880 Out Put : - Terlaksananya sosialisasi PUG terhadap Pokja PUG dan 182 Nagari - Terlatihnya Focal point PPRG yang mampu menyusun anggaran yang responsif gender - Meningkatnya

di - SKPD	Focal point 148 anggota dari seluruh OPD Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 460/82/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Pembentukan Tim Penggerak Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Kabupaten Pesisir Selatan , anggota Tim Driver PPRG terdiri dari Bappedalitbang, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Inspektorat dan BPKD Berdasarkan instruksi Bupati Pesisir Selatan Nomor : 179/Ins-2019 tentang Implementasi Gender Analysis Pathwy (GAP) dan Gender	perempuan saja sehingga kurang direspon oleh OPD dan masyarakat secara umum <u>Partisipasi</u> Masih kurangnya Partisipasi dan pemahaman pengambil kebijakan terhadap PUG. Masih adanya anggapan bahwa PUG hanya lah terkait urusan perempuan saja sehingga kurangnya kepedulian laki-laki sebagai pemangku kebijakan terhadap PUG <u>Kontrol</u> Dalam menentukan kepesertaan dalam pelatihan lebih didominasi	- Belum optimalnya pelaksanaan advokasi dan sosialisasi tentang PUG dan PPRG dikarenakan keterbatasan anggaran dalam melaksanakan kegiatan - Tidak adanya tenaga terlatih (gender champion) yang menguasai PUG sebagai narasumber untuk sosialisasi dan pelatihan PUG di Kabupaten Pesisir Selatan - Sering terjadi rotasi dan mutasi	kan PUG Belum seluruh data gender yang dibutuhkan tersedia di SKPD dan stake holder.		er terkait tentang PPRG - Peserta sosialisasi PUG ditetapkan melalui SK Bupati sebagai tenaga Pokja PUG dan Focal point di SKPD masing-masing - Bintek PUG terhadap Pokja PUG dan Focal Point, terhadap tugas dan fungsinya - Bintek Tim Driver PPRG	- Jumlah nagari yang ada di Kab. Pessel sebanyak 182 nagari , yang sudah mendapatkan sosialisasi PUG sebanyak 23 Nagari - Berlum semua anggota Pokja PUG dan Focal Point memahami tugas mereka sebagai anggota pokja dan Focal Point	pemahaman Anggota Pokja PUG dan Focal Point terhadap Tupoksinya sebagai Anggota Pokja PUG dan Focal Point Out Camp : Terwujudnya pembangunan yang responsif gender di kabupaten Pesisir Selatan
-----------------	---	---	---	---	--	---	---	---

Budget Statemen (GBS) Dalam rencana Kerja anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 ditetapkan secara bertahap 17 OPD yang membuat GAP dan GBS tahun 2020 • Jumlah nagari yang ada di Kab. Pessel sebanyak 182 nagari , yang sudah mendapatkan sosialisasi PUG sebanyak 23 Nagari	oleh keputusan pimpinan <u>Manfaat</u> Para pemangku kebijakan serta perencana program (focal point) di SKPD belum mendapatkan manfaatnya dari program dan kegiatan yang responsif gender	SDM sebagai anggota focal point pada SKPD ▪ Masih kurangnya sosialisasi PUG kepada Masyarakat di Nagari			• Sosialisasi PUG di Nagari		
---	---	--	--	--	---	--	--

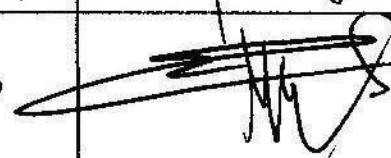
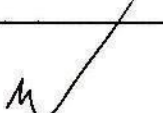
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan



ZULFIAN APRIYANTO, SH, M.Si
NIP. 19651116 198602 1 007

**LEMBARAN VERIFIKASI GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAB) DAN GENDER BADGET STATEMENT (GBS)
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020**

Instansi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kab pes-sel th 2019
 Kegiatan : 1. Pembangunan jembatan gantung rangka
 2. Peningkatan Jalan kabupaten
 Tanggal : 19 Juni 2019

No	Tim Driver PPRG	Tanda Tangan	Keterangan
1	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Nama : <i>Zuharna</i> NIP : 1968031519920310018		
2	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Nama : <i>Rahmiyetti Lorus</i> NIP : 196608191992032007		
3	Inspektorat Nama : <i>Agdian Juman</i> NIP : 1968031519920310018		
4	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Nama : <i>Subhan</i> NIP : 197204161999031002		

Hasil Penfikasi

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

as Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Lihat Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program : Pembangunan Jembatan Rangka Binjai (Lanjutan) Kegiatan : Pembangunan Jembatan Rangka Binjai (Lanjutan) Output : Tersedianya jembatan rangka yang aman, ramah dan dapat digunakan oleh seluruh kalangan masyarakat umum	– Panjang Jembatan Rangka Binjai (Lanjutan) sepanjang 50 meter – Di Nagari tersebut hanya terdapat 1 unit jembatan rangka yang tidak layak pakai	AKSES : Jembatan tersebut merupakan satu- satunya akses perekonomian masyarakat setempat PARTISIPASI : Hasil musrenbang kabupaten belum memprioritaskan penggantian jembatan rangka yang baru KONTROL : Tidak sesuai beban kendaraan yang lewat dengan tonase jembatan rangkayang ada	Belum menjadi kegiatan prioritas anggaran	Adanya pandangan bahwa proses pembangunan dapat dilakukan secara umum tanpa memperhatika n aspek akses, partisipasi, kontrol dan manfaat bagi masyarakat.	Tersedianya jembatan rangka yang aman, ramah dan dapat digunakan oleh semua kalangan masyarakat umum	– Melakukan Survey Lapangan – Merencanakan pembangunan jembatan rangka yang ramah dan aman untuk wanita, anak- anak, lansia dan penyandang disabilitas.	– Panjang Jembatan Rangka Binjai (Lanjutan) sepanjang 50 meter – Di Nagari tersebut hanya terdapat 1 unit jembatan rangka yang tidak layak pakai	Input : - Rp. 10.100.000.000 Output : - Terlaksananya Pembangunan Jembatan Rangka Binjai yang responsive gender Outcome : - Tersedianya Pembangunan Jembatan Rangka Binjai sepanjang 50 meter

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Pilih Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
		MANFAAT : Belum optimalnya pemakaian jembatan Rangka Binjai oleh Masyarakat						

Painan, 19 Juni 2019

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan



ERASUKMA MUNAF, ST, MM
NIP. 19720925 199803 1 003

Hasil Verifikasi

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Pilih Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program : Pembangunan jalan dan pelembutan Kegiatan : Peningkatan Jalan Kabupaten Paket : Peningkatan Jalan Koto Baru – Limau Manis Tujuan : Tersedianya jalan kabupaten yang aman, ramah dan dapat digunakan oleh semua kalangan masyarakat umum	– Panjang Jalan Koto Baru – Limau Manis 7,1 Km – Kondisi Jalan Koto Baru – Limau Manis yang rusak 5,2 Km	AKSES : Jalan Koto Baru – Limau Manis yang masih rusak memberikan rasa tidak nyaman terhadap pengguna jalan. PARTISIPASI : Hasil musrenbang kabupaten belum memprioritaskan perbaikan Jalan Koto Baru – Limau Manis. KONTROL : - Kurang pedulinya masyarakat terhadap kondisi jalan yang ada - Tidak sesuai beban kendaraan yang lewat dengan tonase jalan yang ada	Belum menjadi kegiatan prioritas anggaran	Adanya pandangan bahwa proses pembangunan dapat dilakukan secara umum tanpa memperhatika n aspek akses, partisipasi, kontrol dan manfaat bagi masyarakat.	– Tersedianya jalan kabupaten yang aman, ramah dan dapat digunakan oleh semua kalangan masyarakat umum	– Melakukan Survey Lapangan – Merencanakan pembangun an jalan yang ramah dan aman untuk wanita, anak-anak, lansia dan penyandang disabilitas.	– Panjang Jalan Koto Baru – Limau Manis 7,1 Km – Kondisi Jalan Koto Baru – Limau Manis yang rusak 5,2 Km	Input : • Rp. 10.400.000 Output : • Terlaksana Peningkatan Jalan Koto Baru – Limau Manis Outcome : • Tersedianya peningkatan Jalan Koto Baru – Limau Manis sepanjang Km

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Kategori Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
		MANFAAT : Belum optimalnya pemakaian jalan Koto Baru – Limau Manis oleh Masyarakat						

Painan, 19 Juni 2019

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan



ERASUKMA MUNAF, ST, MM
NIP. 19720925-199803 1 003

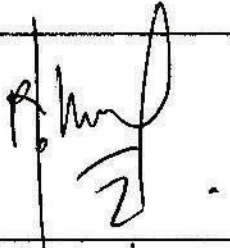
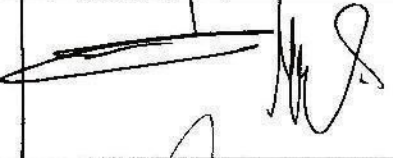
**LEMBARAN VERIFIKASI GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAB) DAN GENDER BADGET STATEMENT (GBS)
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020**

Instansi : Dinas Kesehatan

Kegiatan : 1. Peningkatan Imunisasi

2. Usaha Kesehatan Ibu dan Anak

Tanggal : 19 - Juni - 2019

No	Tim Driver PPRG	Tanda Tangan	Keterangan
1	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Nama : Pr Zuhri per NIP : 196603051982031084		
2	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Nama : Rahmi qah labay. NIP : 1966081919922007		
3	Inspektorat Nama : ALDIAN NIP :		
4	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Nama : Inawati NIP : 19820172201001202		

Format 1

Gender Analysis Pathway (GAP)

DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020

HASIL

VERIFIKASI

Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3	Kolom 4	Kolom 5	Kolom 6	Kolom 7	Kolom 8	Kolom 9
Kebijakan/ Program/Ke giatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			Kebijakan dan Rencana Aksi Kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data dasar (Baseline)	Indikator Gender
Program : Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan Anak Kegiatan : Usaha Kesehatan Ibu dan Anak Tujuan: Mengurangi Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi	Jumlah : Penduduk 507.704 Jiwa, laki- laki ; 257.293 jiwa dan Perempuan 250.411 jiwa dan ibu hamil : 11.253 org Jumlah PUS Tahun 2018 : 76.610 Jumlah bayi lahir laki-laki : 4.406 org perempuan : 3.983 org (data 2018) Rasio RS 1 : 100.000 pdkk RS yang ada 3 unit, kurang 2 unit AKI tahun 2018 : 92,27 / 100.000 KH (8 org)	Akses : Jauhnya Jarak Tempuh ke RS rujukan Partisipasi : Kurangnya kepedulian masyarakat tentang kesehatan Ibu dan Anak. Kurangnya Ilmu Pengetahuan Masyarakat tentang Kesehatan Ibu dan Anak Control : Kurangnya dukungan suami dan keluarga	1. Jauhnya akses RS rujukan 2. Kurang tanggapnya petugas kesehatan terhadap keselamatan ibu dan bayi.	1. Terbatasnya alat transportasi Umum yang layak dapat mengantarkan ibu hamil ke Fasilitas kesehatan 2. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang keselamatan ibu hamil dan bayi 3. Sebagian Ibu Hamil berperan sebagai pencari nafkah karena Faktor Ekonomi Keluarga untuk asupan gizi	Mengurangi Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi	1. Melaksanakan koordinasi/ MOU lintas sektor. 2. sosialisasi / Bintek tentang Keselamatan ibu melahirkan dan anak. 3. Melaksanakan Monev Program KIA ke Puskesmas 4. Melaksanakan pertemuan lintas program dan tatalaksana bumil anemia 5. melaksanakan audit Maternal dan Perinatal 6. Melaksanakan Review Program Kelas Ibu Hamil	Jumlah : Penduduk 507.704 Jiwa, laki- laki ; 257.293 jiwa dan Perempuan 250.411 jiwa dan ibu hamil : 11.253 org Jumlah PUS Tahun 2018 : 76.610 Jumlah bayi lahir laki-laki : 4.406 org perempuan : 3.983 org (data 2018) Rasio RS 1 : 100.000 pdkk RS yang ada 3 unit, kurang 2 unit AKI tahun 2018 : 92,27 / 100.000 KH (8 org)	Input : Rencana Aksi 1 : Rp.500.000.000,- Output : 1. MOU dengan Lintas Sektor 2. Meningkatnya kemampuan dan keterampilan petugas dalam pelaksanaan kegiatan program KIA 3. Meningkatnya pengetahuan ibu dan

AKB tahun 2018 : 10.84 / 1000 KH (94 org) Jumlah Kelahiran Hidup 8670 org Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2016 67/100.000 KH (6 Org), Tahun 2017 89/100.000 KH (5 Org), Tahun 2018: 92,3/100.000 KH (6 Org). Angka kematian Bayi (AKB) tahun 2016 : 5/1000 KH (48 jiwa), Tahun 2017 : 6/1000 KH (42 jiwa, Tahun 2016 Sebanyak 48 Jiwa.	dalam pengambil keputusan untuk segera melakukan rujukan sesuai keputusan medis Manfaat : Kurangnya wawasan masyarakat tentang kesehatan Ibu dan Anak	1. Kurangnya koordinasi antar Lintas Sektor 2. Masih kurangnya bantuan dana dari Pusat (Jampersal)	dan Balita 7. Melaksanakan Review Kohor, P4K, MTB M/Mtbs di Puskesmas.	AKB tahun 2018 : 10.84 / 1000 KH (94 org) Jumlah Kelahiran Hidup 8670 org Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2016 67/100.000 KH (6 Org), Tahun 2017 89/100.000 KH (5 Org), Tahun 2018: 92,3/100.000 KH (6 Org). Angka kematian Bayi (AKB) tahun 2016 : 5/1000 KH (48 jiwa), Tahun 2017 : 6/1000 KH (42 jiwa, Tahun 2016 Sebanyak 48 Jiwa.	keluarga tentang kesehatan ibu dan anak Outcome : Menurunnya Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita
--	--	--	---	--	--

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

**DINAS
KESEHATAN**

Dr. H. Satria Wibawa, M.Kes
NIP. 19650531 199803 1 002

Format 1
Gender Analysis Pathway (GAP)

DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020

Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3	Kolom 4	Kolom 5	Kolom 6	Kolom 7	Kolom 8	Kolom 9
Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			Kebijakan dan Rencana Aksi Kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data dasar (Baseline)	Indikator Gender
Program : Pencegahan dan Penanggulang an Penyakit Menular Kegiatan : Peningkatan Imunisasi Tujuan: Menurunnya prevalensi penyakit menular pada masyarakat dikabupaten pesisir selatan.	Jumlah ibu hamil 11.253 orang. Jumlah Bayi tahun 2018 8.955 bayi Jumlah wanita usia subur (WUS) 84.847 orang Jumlah PUS Tahun 2018 : 76.610	Akses : Kurangnya informasi dan jauhnya rumah penduduk ke fasilitas kesehatan / posyandu Partisipasi : Kurangnya kepedulian masyarakat tentang pentingnya imunisasi. Control : Kurangnya dukungan suami dan keluarga dalam pengambilan keputusan	1. Masih kurangnya penyuluhan dari tenaga medis tentang betapa pentingnya imunisasi 2. Kurangnya koordinasi dengan lintas sektor	1. Kurangnya kemauan Masyarakat untuk datang ke fasilitas kesehatan 2. Masih banyak paradigma masyarakat bahwa jika diimunisasi bayinya akan demam 3. Masalah ekonomi yang biasanya menyertai ibu dan keluarga 4. Kurangnya kesadaran ibu tentang	Menurunnya prevalensi penyakit menular pada masyarakat dikabupaten pesisir selatan.	1.melaksanakan pelayanan imunisasi dasar lengkap (IDL) pada bayi 2. Memberi kan penyuluhan kepada ibu dan keluarga tentang pentingnya imunisasi 3. Melaksanakan koordinasi dengan lintas sektor	Jumlah ibu hamil 11.253 orang. Jumlah Bayi tahun 2018. 8.955 bayi Jumlah wanita usia subur (WUS) 84.847 orang Jumlah PUS Tahun 2018 : 76.610 Jumlah bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap tahun 2018 (IDL) 8.042 bayi jumlah ibu hamil	Input : Rp.200.000.000,- Output : 1.Imunisasi rutin 8.514 bayi 2.imunisasi ibu hamil 9.487 3.imunisasi biasa 29.952 orang Outcome : 1. jumlah bayi yang di Imunisasi rutin

		Manfaat : - Tingginya Resiko Penularan Penyakit akibat tidak meratanya Imunisasi		pentingnya imunisasi			yang mendapat imunisasi TD1 2.250 orang (20%), imunisasi TD2 2.003 orang (17,8%), imunisasi TD3 1.037 orang (9,2%), imunisasi TD4 769 orang (6,8%), imunisasi TD5 721 orang (6,4%),	8.514 bayi 2.Jumlah imunisasi ibu hamil 9.487 3Jumlah imunisasi biasa 29.952 orang
--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESIR SELATAN



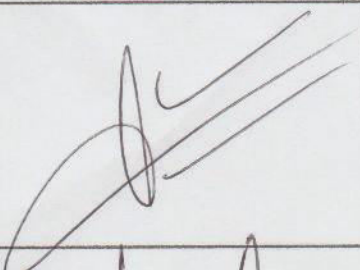
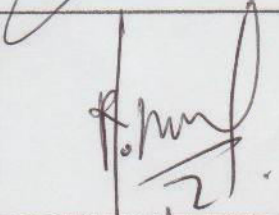
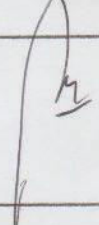
Dr. H. Satria Wibawa, M.Kes
NPS 1968031 199803 1 002

**LEMBARAN VERIFIKASI GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAB) DAN GENDER BADGET STATEMENT (GBS)
KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2020**

Instansi : DPMDPPKB

Kegiatan : 1. Penyelesaian Media Komunitas, Informan dan Edukasi (LIE) KB
2. Bakti KB Kas IBI / IBI / TBI / Prayangkara / PKK dan Jambang -

Tanggal : 19 Juni 2019

No	Tim Driver PPRG	Tanda Tangan	Keterangan
1	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Nama : <i>Zuharni</i> NIP : <i>19660301992031006</i>		
2	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Nama : <i>Rahmiyetti Larus</i> NIP : <i>196603191992032008</i>		
3	Inspektorat Nama : <i>LIRITA JULIA</i> <i>276Kam</i> NIP :		
4	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Nama : <i>IRNAWATI</i> NIP : <i>198301122010012022</i>		

HASIL VERIFIKASI**MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)**

SKPD :DPMDPPKB KABUPATEN PESIRIS SELATAN

PROGRAM : 1.02.08.1.02.07.01.27. - Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Keluarga Berencana.

KEGIATAN : 1.02.08.1.02.07.01.27.07. - Penyediaan Media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Keluarga Berencana (DAK Non Fisik)

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			Kebijakan dan Rencana Aksi Kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Keluarga Berencana. Kegiatan : Penyediaan Media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Keluarga Berencana (DAK Non Fisik) Tujuan : Meningkatkan Pelayanan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan Kontrasepsi Jangka Pendek	Data Jumlah penduduk pesisir selatan :Tahun 2018 yaitu 501.197 dengan rincian 247.449 (jiwa).laki-laki dan 253.748 (jiwa)perempuan. Jumlah nagari di pesisir selatan.182 Nagari/Desa Jumlah Pasangan Usia Subur di Kab Pessel 78,673 Jumlah Aseptor KB yang menggunakan aseptor KB: 18,83 (2.475 MKJP dan 13.140 aseptor)	Akses : - Kurangnya media komunikasi, informasi dan Edukasi tentang program Keluarga Berencana bagi Masyarakat - Masih Kurangnya Informasi Tentang Pemakaian Kontrasepsi Partisipasi : -. Masih rendahnya kepedulian Masyarakat terhadap informasi Keluarga Berencana Control : Masih kurangnya Media komunikasi	Media KIE masih bias Gender	- Stigma masyarakat bahwa yang memakai kontrasepsi itu perempuan - Kurangnya kesadaran lelaki untuk menggunakan kontrasepsi	Tujuan : Meningkatkan Pelayanan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan Kontrasepsi Jangka Pendek	Pengadaan Media Informasi KIE	Data Jumlah penduduk pesisir selatan :Tahun 2018 yaitu 501.197 dengan rincian 247.449 (jiwa).laki-laki dan 253.748 (jiwa)perempuan Jumlah nagari di pesisir selatan.182 Nagari/Desa Jumlah Pasangan Usia Subur di Kab Pessel 78,673 Jumlah Aseptor KB yang menggunakan aseptor KB:	Input : Jumlah Dana Rp. Rp. 195.579.720, Output : Jumlah Media KIE yang dilaksanakan Outcome : Meningkatnya pengetahuan Masyarakat tentang pemakaian kontrasepsi jangka panjang dan Pendek

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			Kebijakan dan Rencana Aksi Kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
		Manfaat : Media belum mampu memberikan informasi secara menyeluruh kepada Masyarakat tentang Program KB					18,83 (2.475 MKJP dan 13.140 aseptor	



NIP. 19740530 200003 1 005

HASIL VERIFIKASI

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

SKPD :DPMDPPKB KABUPATEN PESIR SELATAN

PROGRAM :1.02.07.01.31. - Program Peningkatan Program Pelayanan Keluarga Berencana.

KEGIATAN : 1.02.07.01.31.01 – Bakti KB Kes IBI/IDI/TNI/Bhayangkara/PKK dan Jambore

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			Kebijakan dan Rencana Aksi Kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program : Program Peningkatan Program Pelayanan Keluarga Berencana. Kegiatan : BAkti KB Kes IBI/IDI/TNI/Bhayangkara/PK K dan Jambore Tujuan : Meningkatkan Pelayanan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Data Jumlah penduduk pesisir selatan :Tahun 2018 yaitu 501.197 dengan rincian 247.449 (jiwa).laki- laki dan 253.748 (jiwa)perempuan. Jumlah nagari di pesisir selatan.182 Nagari/Desa Jumlah Pasangan Usia Subur di Kab Pessel 78,673 Jumlah Aseptor KB yang menggunakan aseptor KB: 18,83 (2.475 MKJP dan 13.140 aseptor)	Akses : - Sedikitnya Rasio Penggunaan Kontrasepsi KB menggunakan metode Kontrasepsi Jangka Panjang (IUD, MOW, Implat dan MOP) - Masih Kurangnya Informasi Tentang MKJP - Memotifasi masyarakat untuk menggunakan metode MKJP dengan Pemberian Dana Stimulan Partisipasi : -. Kurangnya peran aktif masyarakat dalam menggunakan kontrasepsi	- Kurangnya tenaga penyuluh KB dalam memfasilitasi pengguna KB jangka panjang	- Stigma masyarakat bahwa yang memakai kontrasepsi itu perempuan - Kurangnya kesadaran lelaki untuk menggunakan kontrasepsi - Kurangnya kesadaran masyarakat tentang metode kontrasepsi jangka panjang - Adanya beberapa kejadian	Meningkatkan Pelayanan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang metode kontrasepsi jangka panjang Meningkatkan peran aktif Masyarakat dan TNI untuk mencari aseptor KB untuk metode kontrasepsi jangka panjang Pengusulan Penambahan tenaga penyuluh KB ke Pusat	Data Jumlah penduduk pesisir selatan :Tahun 2018 yaitu 501.197 dengan rincian 247.449 (jiwa).laki-laki dan 253.748 (jiwa)perempuan Jumlah nagari di pesisir selatan.182 Nagari/Desa Jumlah Pasangan Usia Subur di Kab Pessel 78,673 Jumlah Aseptor	Input : Jumlah Dana Rp. 244.550.000 Output : Jumlah Pemakaian kontrasepsi MKJP sebanyak IUD sebanyak 290 Orang, IMPLAN 18.78 Orang, MOW 112 Orang, dan MOP 166 Orang Outcome : Menurunkan angka Kelahiran

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			Kebijakan dan Rencana Aksi Kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
		Jangka Panjang Control : Banyaknya PUS yang telah mempunyai Anak lebih dari dua orang tidak mendapat persetujuan dari pasangan Manfaat : - Kurangnya Pelayanan KB dengan Menggunakan metode Kontrasepsi Jangka Panjang		komplikasi penggunaan kontrasepsi jangka panjang yang membuat masyarakat takut menggunakan kontrasepsi jangka panjang			KB yang menggunakan asektor KB: 18,83 (2.475 MKJP dan 13.140 asektor)	



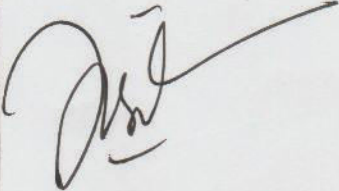
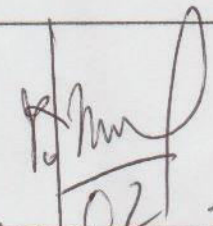
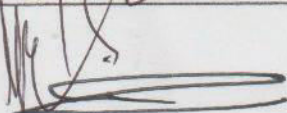
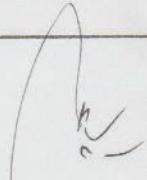
Kepala DPMDPPKB ,
HAMDI, S.Pt, M.Si
 NIP. 19740530 200003 1 005

**LEMBARAN VERIFIKASI GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAB) DAN GENDER BADGET STATEMENT (GBS)
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020**

Instansi : Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan.

Kegiatan : 1. Pemberdayaan kelembagaan dan Usaha Peternakan.
2. Promosi atas produksi hasil peternakan unggulan daerah.

Tanggal : 19-6-2019.

No	Tim Driver PPRG	Tanda Tangan	Keterangan
1	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Nama : Syahrul NIP : 196202031994031002		
2	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Nama : Rahmiyetti Laroes NIP : 196608191992032007		
3	Inspektorat Nama : 1. IRMA YULIA 2. YUPRIAN NIP :		
4	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Nama : Irna Wah NIP :		

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

PROGRAM : Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kegiatan Program Kegiatan	Data Pemuka Wanita	Faktor Kesetaraan	Salah Kesetaraan Internal	Salah Kesetaraan Eksternal	Reformasi Sistem	Reformasi	Reformasi	Reformasi
Program : Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Kegiatan : Pemberdayaan Kelembagaan dan Usaha Peternakan Tujuan : Meningkatkan sumberdaya petani ternak	- Jumlah penduduk Pesisir Selatan, laki-laki 226.783 perempuan 230.502 (data PSCA tahun 2013) - Jumlah penduduk pesisir, yg bekerja disektor pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan 85.368 orang (44,53% dari jumlah penduduk) - Rumah tangga peternak tahun 2018 : Sapi 35.952 RTP Kerbau 2.900 RTP Kambing 6.492 RTP Ayam lokal 52.663 RTP Ayam potong 184 Ayam ras petelur 30 RTP Itik 5.037 RTP Kelompok Tani Ternak 350 Kelompok - SDM peternak masih terbatas baik dari segi kualitas maupun pengalaman	Akses : - Sebagian besar wanita pesisir adalah ibu rumah tangga, Partisipasi : - Peran perempuan dalam membantu perekonomian masih rendah dan berperan ganda sebagai pemelihara ternak Kontrol : - Biasanya yang dilibatkan dalam pelatihan adalah kaum bapak bapak Manfaat : - Masih rendahnya peran Kaum ibu dalam mendapatkan pelatihan melalui pengembangan usaha peternakan mulai dari pemeliharaan rutin sampai pengolahan hasil peternakan	- Kurangnya informasi kepada masyarakat yang disebabkan oleh keterbatasan tenaga teknis peternakan.	- Pola pikir masyarakat bahwa yg menjadi pencari nafkah adalah laki-laki sehingga perempuan tidak perlu dilatih - Pendidikan perempuan cenderung lebih rendah dibanding kaum laki-laki - Akses informasi bagi kaum laki-laki lebih banyak dibanding Kaum Perempuan - Adanya pemahaman tugas kaum ibu adalah mengurus pekerjaan rumah tangga	Meningkatkan sumberdaya petani ternak Perempuan	- Pelatihan manajemen agribisnis - BinteK Usaha Ayam Ras Pedaging - sosialisasi program AUTS dan KUR Peternakan - BinteK Kelembagaan dan Usaha peternakan	- Jumlah penduduk Pesisir Selatan, laki-laki 226.767, perempuan 230.517 (data PSCA tahun 2018) - Jumlah penduduk pesisir, yg bekerja disektor pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan 85.368 orang (44,53% dari jumlah penduduk) - Rumah tangga peternak tahun 2018 : Sapi 35.952 RTP Kerbau 2.900 RTP Kambing 6.492 RTP Ayam lokal 52.663 RTP Ayam potong 184 Ayam ras petelur 30 RTP Itik 5.037 RTP Kelompok Tani Ternak 350 Kelompok - SDM peternak masih terbatas baik dari segi kualitas maupun pengalaman	Input : Rp. 281.826.000 Output : Jumlah petani yang mendapat pelatihan kelembagaan dan usaha peternakan sebanyak 80 orang dengan 4 Pelatihan Outcome : 1. Terbinanya kelembagaan dan teknis usaha ternak kelompok tani ternak sebanyak 20 peternak 2. Terlatihnya peternak dalam agribisnis peternakan sebanyak 20 peternak 3. Terbinanya usaha kemitraan ayam ras pedaging sebanyak 20 peternak 4. Terfasilitasinya pengembangan modal usaha ternak masyarakat melalui perbankan sebanyak 20 peternak
Program Peningkatan pemasaran hasil	Populasi sapi tahun 2017 sekitar 81.786 ekor	Akses : Penguasaan pemasaran ternak dan hasil ternak,	- Belum maksimalnya peran petugas	- Waktu perempuan lebih banyak tersita	Dikenalnya produk Hasil	Mengikuti even promosi tingkat	- Populasi sapi tahun 2017 sekitar 81.786 ekor	Input : Rp. 350.000.000

	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
produksi peternakan	- Rumah tangga pemelihara ternak tahun 2018 : Sapi 35.952 RTP Kerbau 2.900 RTP Kambing 6.492 RTP Ayam lokal 52.663 RTP Ayam potong 184 Ayam ras petelur 30 RTP Itik 5.037 RTP	kondisi pasar masih belum kondusif untuk perempuan, termasuk transportasi dan kondisi lapangan Partisipasi : Belum ada pelaku pasar Perempuan Kontrol : Kurangnya partisipasi perempuan sebagai pelaku pasar, biasanya laki-laki lebih dominan dalam acara promosi dan pemasaran hasil peternakan dan produk hasil peternakan Manfaat : Belum berperan aktif perempuan dalam promosi, pengolahan hasil dan pemasaran hasil produk peternakan	peternakan dalam mempromosikan hasil produksi peternakan	untuk mengurus rumah tangga - Laki-laki lebih bebas bergerak dalam pemasaran hasil dibanding perempuan - Pasar Ternak umumnya dikuasai oleh kaum laki-laki - Pergaulan dilingkungan pemasaran hasil peternakan dan produk hasil peternakan relatif keras dan tidak aman bagi perempuan - Butuh sarana transportasi dan tenaga yang besar untuk pemasaran hasil peternakan	Peternakan dan Hasil Olahahan dari kabupaten Pesisir Selatan oleh masyarakat luas	daerah , propinsi maupun nasional dengan melibatkan usaha rumah tangga pengolahan hasil peternakan	- Rumah tangga peternak tahun 2018 : Sapi 35.952 RTP Kerbau 2.900 RTP Kambing 6.492 RTP Ayam lokal 52.663 RTP Ayam potong 184 Ayam ras petelur 30 RTP Itik 5.037 RTP Kelompok Tani Ternak 350 Kelompok	Output : b) Terlaksana dan diikuti 4 even promosi hasil peternakan yakni : - Festival Langkisau - Livestock expo dan bulan bakti peternakan - Sumbar Expo - APKASI b). Terlaksananya Operasi Pasar Komoditi Peternakan (Daging,Ayam Potong dan Telur) c). Terlaksananya pendataan kembali unit usaha pengolahan hasil peternakan Outcome : a). Jumlah even yang berhasil diikuti dalam rangka promosi hasil produksi peternakan daerah b). Jumlah masyarakat khususnya perempuan yang mendapat fasilitasi mendapat harga murah dalam operasi pasar komoditi peternakan (daging ayam potong dan telur ayam) c) bantari be inye usaha pengolahan hasil peternakan

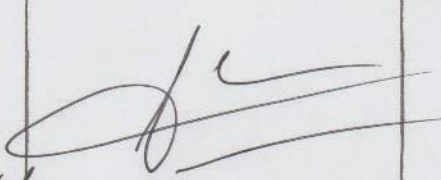
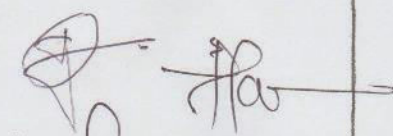
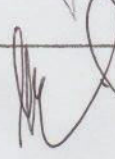
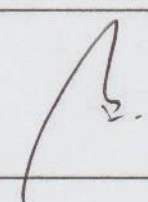


LEMBARAN VERIFIKASI GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) DAN GENDER BADGET STATEMENT (GBS)
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020

Instansi : Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian

Kegiatan : 1. Pembinaan, Pengawasan dan Pembenahan Penghargaan Koperasi Berprestasi
 2. Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah

Tanggal : 20 Juni 2019

No	Tim Driver PPRG	Tanda Tangan	Keterangan
1	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Nama : <i>Zuharnu</i> NIP : <i>196603051992031001</i>		
2	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Nama : <i>DESRI LAKSMIDARTI Yulia Nofha, SE</i> NIP :		
3	Inspektorat Nama : <i>1. IRMA YULIA</i> NIP :		
4	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Nama : <i>Wanawati</i> NIP : <i>198301122010012001</i>		

HASIL VERIFIKASI

Matrik Gender Analysis Pathway (GAP) Tahun 2020

OPD : DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program : Peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi Kegiatan : Pembinaan, Pengawasan dan Pemberian Penghargaan Koperasi Berprestasi Tujuan : Meningkatnya kualitas kelembagaan dan usaha koperasi	- Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 10 Tahun 2015 tentang kelembagaan koperasi. - Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengawasan Koperasi. - Berdasarkan data keragaan koperasi tahun 2018, jumlah koperasi yang ada di Kab. Pesisir Selatan sebanyak 300 unit, koperasi aktif sebanyak 115 unit dan 185 merupakan koperasi tidak aktif. - Dari 115 unit koperasi tersebut, yang menjadi	Akses : 1. Kurangnya partisipasi perempuan dalam manajemen koperasi. 2. Dominasi laki-laki dalam kepengurusan koperasi dibandingkan perempuan. Partisipasi : Kurangnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan.	1. Keterbatasan SDM tenaga teknis bidang koperasi dalam memberikan pembinaan dan pengawasan koperasi. 2. Kurang sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pembinaan dan pengawasan koperasi. 3. Kurangnya informasi dalam pengarusutamaan gender di lingkungan koperasi,	1. Masih rendahnya pemahaman Pengurus, Pengawas dan anggota koperasi tentang perkoperasian. 2. Masih kuatnya budaya bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. 3. Kurangnya pemahaman terhadap konsep gender.	Meningkatnya kualitas kelembagaan dan usaha koperasi yang responsive gender	1. Melakukan pembinaan dan pengawasan koperasi serta memberikan pemahaman kepada anggota koperasi khususnya perempuan untuk pengkaderan menjadi pengurus koperasi. 2. Melakukan penilaian kinerja koperasi yang berbasis gender.	- Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 10 Tahun 2015 tentang kelembagaan koperasi. - Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengawasan Koperasi. - Berdasarkan data keragaan koperasi tahun 2018, jumlah koperasi yang ada di Kab. Pesisir Selatan sebanyak 300 unit, koperasi aktif sebanyak 115 unit dan 185 merupakan koperasi tidak aktif. - Dari 115 unit koperasi tersebut, yang menjadi Pengurus Koperasi didominasi	Input : Rp. 385.562.900 Out Put : Terbinanya 115 Koperasi Aktif Out come : Meningkatnya kualitas kelembagaan dan usaha koperasi yang responsive gender

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base- Line)	Indikator Kinerja
	Pengurus Koperasi didominasi oleh laki-laki sekitar $\pm$ 70%, sedangkan perempuan hanya sebesar 30%.	Kontrol : Penilaian kinerja koperasi belum berbasis gender. Manfaat: Pengurus koperasi belum menyadari sepenuhnya manfaat dari kegiatan pembinaan dan pengawasan koperasi yang sudah dilaksanakan.					oleh laki-laki sekitar $\pm$ 70%, sedangkan perempuan hanya sebesar 30%.	

Paiman, 20 Juni 2019
 Kepala
 Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian
 Kabupaten Pesisir Selatan



Drs. A Z B A L
 NIP. 19621231-198602 1 039

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Gender
	yang telah terdata di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2018 sebanyak 6.968 orang yang terdiri dari : - Laki-laki sebanyak 3.416 orang - Perempuan sebanyak 3.474 orang Jumlah UMKM yang sudah di latih berjumlah 17 orang laki-laki dan 43 perempuan) Bentuk pelatihan yang diberikan berupa pemasaran, pengembangan usaha, meningkatkan kualitas produk, membaca peluang pasar, kemasan yang menarik agar konsumen tertarik	Manfaat : - Belum terciptanya SDM yang berkualitas, kreatif sebagai bekal dalam berwirausaha agar dapat membangun jejaring bisnis dan menciptakan wirausaha pemula serta mengembangkan Home Industri		pelaku UMKM - Kurangnya difersifikasi produk UMKM. - Para pelaku UMKM kurang inovatif terhadap pengembangan usahanya. - Masih terbatasnya pemasara produk-produk UMKM - belum tertatanya administrasi keuangan para pelaku UMKM		pembinaan, pendampingan, monitoring dan evaluasi terhadap UMKM yang telah mengikuti pelatihan kewirausahaan dan UMKM yang telah mendapatkan bantuan dana wirausaha pemula dari Kementerian Koperasi dan UKM RI.	Pesisir Selatan pada tahun 2018 sebanyak 6.968 unit yang terdiri dari : - Laki-laki sebanyak 3.416 unit - Perempuan sebanyak 3.474 unit Jumlah UMKM yang sudah di latih berjumlah 17 orang laki-laki dan 43 perempuan) Bentuk pelatihan yang diberikan berupa pemasaran, pengembangan usaha, meningkatkan kualitas produk, membaca peluang pasar, kemasan yang menarik agar konsumen tertarik	

Pamang, 20 Juni 2019
Kepala
Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Pesisir Selatan

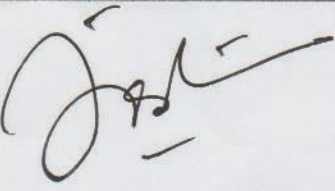
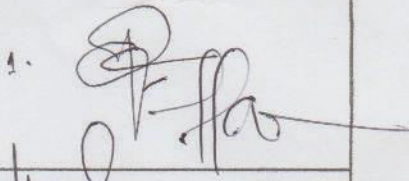
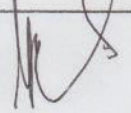
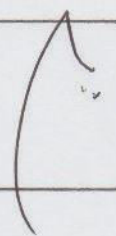


Drs. AZRIAL

NIP. 19621231 198602 1 039

**LEMBARAN VERIFIKASI GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAB) DAN GENDER BADGET STATEMENT (GBS)
KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2020**

Instansi : Dinas Capil
 Kegiatan : 1. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Kependudukan .
 2. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Rumah Tangga .
 Tanggal : 20 Juni 2019

No	Tim Driver PPRG	Tanda Tangan	Keterangan
1	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Nama : Syahrul NIP : 081266498456 .		
2	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Nama : DESRI LAKSMIDARTI, NIP : Julia Xefita		
3	Inspektorat Nama : 1. IRMA JULIA NIP :		
4	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Nama : Imawati NIP : 19830112 201001 2021		

OPD

: DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan (Fakta/Fenomena Yang Terjadi)	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan (Apa Yang Menyebabkan Hal Tersebut Terjadi) (Akses, Partisipasi Dan Kontrol)	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program : Penataan Administrasi Kependudukan Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Aparatur Kependudukan Tujuan : Meningkatkan Kapasitas Apatur Pelayanan Admininduk	1. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan 2. Tahun 2017 jumlah pegawai sebanyak 47 orang. 3. Tahun 2018 jumlah pegawai sebanyak 128 orang terdiri dari 51 orang pegawai Disdukcip Painan dan 77 orang pegawai Unit Kerja Layanan (UKL) 4. Tahun 2019 jumlah pegawai sebanyak 137 orang terdiri dari 47 orang pegawai di Disdukcip Painan dan 90 orang di Unit Kerja Layanan (UKL) 5. Adanya penambahan pegawai baru di UKL sehingga mereka belum mengerti tentang penggunaan aplikasi SIAK	Akses: Operator dan Register Pegawai di UKL belum mahir menggunakan aplikasi SIAK Partisipasi : Operator dan Register membutuhkan waktu yang cukup untuk memahami aplikasi SIAK. Kontrol : Operator dan register membutuhkan buku panduan aplikasi SIAK yang mudah untuk dipahami Manfat : Lambatnya layanan administrasi kependudukan kepada masyarakat	1. Operator dan Register UKL Disdukcip di 15 Kecamatan berasal dari Pegawai UPTD Dinas Pendidikan. 2. Keterbatasan kualitas kapasitas SDM Pelayanan Kependudukan	1. Masyarakat yang dilayani berasal dari berbagai kalangan dan jenjang pendidikan yang berbeda-beda 2. Masyarakat selalu ingin mendapatkan pelayanan yang memuaskan walaupun persyaratan mereka kurang	Meningkatkan Kapasitas Apatur Pelayanan Admininduk	Mengadakan Bimbingan Teknis kepada Aparatur pelayanan Administrasi Kependudukan	1. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan 2. Tahun 2017 jumlah pegawai sebanyak 47 orang 3. Tahun 2018 jumlah ASN Dukcapil berjumlah 128 orang terdiri dari 51 orang pegawai Disdukcip Painan dan 77 orang pegawai Unit Kerja Layanan (UKL) 4. Tahun 2019 jumlah ASN Dukcapil berjumlah 137 orang terdiri dari 47 orang pegawai di Disdukcip Painan dan 90 orang di Unit Kerja Layanan (UKL)	Input : Rp. 150.000.000 Output : 75 Peserta sosialisasi administrasi kependudukan Outcome : Meningkatnya kapasitas dan kemampuan SDM pelayanan Administrasi Kependudukan

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan (Fakta/Fenomena Yang Terjadi)	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan (Apa Yang Menyebabkan Hal Tersebut Terjadi) (Akses, Partisipasi Dan Kontrol)	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Kinerja
	6. Jumlah Penduduk tahun 2016 sebanyak 520.036 jiwa, tahun 2017 sebanyak 501.197 jiwa, tahun 2018 sebanyak 507.704 jiwa, 7. UKL Disdukcapil baru dibentuk dan beroperasi pada Juli 2018						5. Adanya penambahan pegawai baru di UKL sehingga mereka belum mengerti tentang penggunaan aplikasi SIAK 6. Jumlah Penduduk Kabuapten Pesisir Selatan Pada : tahun 2016 : 520.036 tahun 2017 : 501.197 tahun 2018: 507.704 7. UKL Disdukcapil baru dibentuk dan beroperasi pada Juli 2018	

Painan, 21 Juni 2019

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan



EVAFAUZA YULIASMAN, SE. M.Si
NIP. 19670712 199202 1 001

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan (Fakta/fenomena yang terjadi)	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan (Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi) (Akses, Partisipasi dan Kontrol)	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan 1 : Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kegiatan II : Penyediaan Perlengkapan Rumah Tangga Tujuan : Meningkatkan Kepuasan Pelayanan adminduk kepada Masyarakat	1. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan 2. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 3. Dibutuhkan fasilitas Pelayanan : 1) 1 ruang tunggu pelayanan 2) 16 Ruang bermain anak 3) 16 Ruang Ibu Menyusui 4) 16 loket khusus disabilitas dan lansia. 5) 16 buah kursi roda	Akses: Masyarakat merasa tidak nyaman dalam mengurus dokumen kependudukan karena kurangnya fasilitas pelayanan untuk mereka. Partisipasi : Masyarakat enggan dalam kepengurusan adminduk karena minimnya fasilitas pelayanan. Control : Dukumen perencanaan dalam peningkatan pelayanan telah ada tapi belum maksimal dilaksanakan Manfaat : Menurunnya IKM Pelayanan Adminduk karena kurangnya fasilitas pelayanan.	Belum tertatanya ruang ruang gedung yang ada. Untuk menunjang pelayanan Adminduk.	Masyarakat enggan mengurus dokumen kependudukan karena ruang pelayanan yang tidak responsive gender.	Meningkatkan Kepuasan Pelayanan adminduk kepada Masyarakat	1. Melakukan renovasi gedung kantor dengan membuat ruang Ibu Menyusui, Taman Bermain Anak dan Loket Khusus Disabilitas, Orang Tua dan Ibu Hamil 2. Melakukan pengadaan alat bantu khusus untuk penyanggah disabilitas seperti kursi roda, tongkat, dll 3. Membeli perlengkapan mainan anak – anak, ibu hamil dan menyusui.	1. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan 2. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 3. Dibutuhkan fasilitas Pelayanan : • 1 ruang tunggu pelayanan • 16 Ruang bermain anak • 16 Ruang Ibu Menyusui • 16 loket khusus disabilitas dan lansia. • 16 buah kursi roda	kegiatan I : Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Input : Rp. 150.000.000 Output : Tersedianya 49 ruang khusus pelayanan Outcome : Terciptanya ruang pelayanan yang representative. Kegiatan II : Meningkatkan Kepuasan Pelayanan adminduk kepada Masyarakat Input : Rp. 200.000.000, Output : Tersedianya perlengkapan pelayanan umum : 1. 16 set perlengkapan bermain anak) 2. 16 unit kursi roda

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan (Fakta/fenomena yang terjadi)	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan (Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi) (Akses, Partisipasi dan Kontrol)	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Kinerja
	4. Masih minimnya fasilitas umum pelayanan seperti belum ada ruang/taman bermain anak, bagi masyarakat yang membawa anak dan ruang ibu menyusui 5. Belum tersedianya loket pelayanan khusus disabilitas orang tua dan ibu hamil						4. Masih minimnya fasilitas umum pelayanan seperti belum ada ruang/taman bermain anak, bagi masyarakat yang membawa anak dan ruang ibu menyusui 5. Belum tersedianya loket pelayanan khusus disabilitas orang tua dan ibu hamil	3. 16 set perlengkapan untuk ibu menyusui 4. 16 set perlengkapan disabilitas Outcome : Terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan umum.

Painan, 21 Juni 2019

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan



EVAFUZA YULIASMAN, SE. M.Si

NIP. 19670712 199202 1 001

LEMBARAN VERIFIKASI GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) DAN GENDER BADGET STATEMENT (GBS)

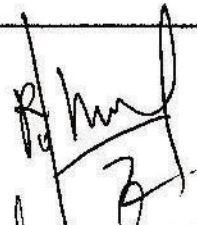
KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2020

Instansi : BKPSDM Kab. Pessel

Kegiatan : 1. Kegiatan Ketrampilan & Profesionalisme.

2. Kegiatan Pendidikan & Pelatihan PIM tk. II

Tanggal : 21 Juni 2019

No	Tim Driver PPRG	Tanda Tangan	Keterangan
1	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Nama : Syahrul NIP :		
2	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Nama : Rahmiyeth Laroes NIP : 19660819 1992 2 007		
3	Inspektorat Nama : I. IRMA YULIA NIP :		
4	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Nama : Linaurah NIP : 19830112 201001 2 022		

Matrik Gender Analysis Pathway (GAP)

PD : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
PROGRAM : Program Pendidikan dan Pelatihan KEGIATAN: Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme TUJUAN: Meningkatkan keterampilan dan profesionalisme sumber daya aparatur	- Sesuai amanat pada Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil, dimana diklat PIM Tk. III merupakan salah satu syarat untuk menduduki jabatan eselon III. - Diklat Pim Tk. III ini harus diikuti oleh PNS yang menduduki jabatan eselon III maksimal 6 (enam) bulan setelah menjabat. - Jumlah PNS yang menduduki jabatan eselon III saat ini sebanyak 159 orang terdiri dari 122 orang laki-laki dan 37 orang perempuan. Dan yang telah mengikuti diklat PIM Tk. III sebanyak 26 orang, terdiri dari 19 orang laki-laki dan 7 orang perempuan. Jadi eselon III yang belum mengikuti diklat PIM Tk. III sebanyak 133 orang terdiri dari 103 orang laki-laki dan 30 orang perempuan.	Akses : - Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan Diklat PIM Tk. III sehingga banyak PNS yang menduduki jabatan eselon III yang belum mengikuti diklat PIM Tk. III Partisipasi : Program Pelatihan PIM Tingkat III pesertanya disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.	- Keterbatasan kebijakan anggaran mengakibatkan peserta PIM III sedikit, sedangkan peminat Tinggi untuk mengikuti PIM III.	- Terbatasnya kuota peserta untuk mengikuti PIM III dari penyelenggara.	Meningkatkan keterampilan dan profesionalisme sumber daya aparatur	- BKPSDM mengirim peserta Diklat PIM Tk. III melalui pola kontribusi ke BKPSDM Prov. Sumbar.	- Sesuai amanat pada Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil, dimana diklat PIM Tk. III merupakan salah satu syarat untuk menduduki jabatan eselon III. - Diklat Pim Tk. III ini harus diikuti oleh PNS yang menduduki jabatan eselon III maksimal 6 (enam) bulan setelah menjabat.	Input: Rp. 250.000.000,- Output: Terkirimnya 8 orang PIM III. Outcome : Meningkatnya keterampilan profesionalisme sumber daya aparatur.

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator
PROGRAM : Program Pendidikan Kedinasan KEGIATAN: Pendidikan dan Pelatihan PIM Tk. IV TUJUAN: Meningkatkan kemampuan profesionalisme sumber daya aparatur.	- Sesuai amanat pada Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil, dimana diklat PIM Tk. IV merupakan salah satu syarat untuk menduduki jabatan eselon IV. - Diklat Pim Tk. IV ini harus di ikuti oleh PNS yang menduduki jabatan eselon IV maksimal 6 (enam) bulan setelah menjabat. - Jumlah PNS yang menduduki jabatan eselon IV saat ini sebanyak 468 orang terdiri dari 261 orang laki-laki dan 207 orang perempuan, dan yang telah mengikuti diklat PIM tk. IV sebanyak 156 orang, terdiri dari 88 orang laki-laki dan 68 orang perempuan. Jadi eselon IV yang belum mengikuti diklat PIM Tk. IV sebanyak 312 orang, terdiri dari 173 orang laki-laki dan 139 orang perempuan.	Akses : - Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan Diklat PIM Tk.IV sehingga banyak PNS yang menduduki jabatan eselon IV yang belum mengikuti diklat PIM Tk. IV Partisipasi : Rendahnya partisipasi PNS yang menduduki jabatan eselon IV (perempuan) dalam mengikuti diklat PIM Tk. IV Kontrol: Belum terpenuhinya amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil, dimana salah satu syarat untuk menduduki jabatan eselon IV adalah dengan mengikuti Diklat PIM Tk. IV Manfaat: Rendahnya kompetensi kemampuan pejabat eselon IV karena belum mengikuti PIM IV.	Keterbatasan kebijakan anggaran mengakibatkan peserta PIM IV sedikit, dan diiringi dengan rendahnya peminat untuk mengikuti PIM IV	-Faktor usia mempengaruhi rendahnya minat peserta untuk mengikuti PIM IV .	Meningkatkan kemampuan profesionalisme sumber daya aparatur	-Melaksanakan Diklat PIM Tk. IV untuk pejabat eelon IV melalui pola fasilitasi dengan peserta terbatas	- Diklat Pim Tk. IV ini harus di ikuti oleh PNS yang menduduki jabatan eselon IV maksimal 6 (enam) bulan setelah menjabat. - Jumlah PNS yang menduduki jabatan eselon IV saat ini sebanyak 465 orang, dan yang telah mengikuti diklat PIM tk. IV sebanyak 175 orang, jadi eselon IV yang belum mengikuti diklat PIM Tk. IV sebanyak 290 orang.	Input: Rp. 467.987 Output: 30 orang p IV yang m PIM Tk. IV T Outcome : Meningkatkan keterampilan profesionali daya aparat

Painan, 2 Juli 2019

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM

KABUPATEN PESIRIS SELATAN

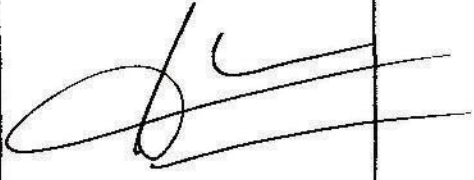
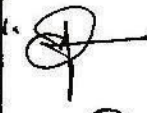
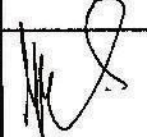


AHDA YANUAR, S.Kom

Nip. 19670101 199003 1 013

**LEMBARAN VERIFIKASI GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) DAN GENDER BADGET STATEMENT (GBS)
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020**

Instansi : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
 Kegiatan : 1. Festival Langleisau
 2. Pendidikan Pemilihan Uda Uniduta Wisata th 2020
 Tanggal : 20 Juni 2019

No	Tim Driver PPRG	Tanda Tangan	Keterangan
1	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Nama : <i>Zuharpen</i> NIP : <i>1966030519920310019</i>		
2	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Nama : <i>DESRI LAUSMUDARTI</i> <i>Yulia Xofita, SE</i> NIP :	 2. 	
3	Inspektorat Nama : <i>I. IRMA YULIA</i> NIP :		
4	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Nama : <i>Irna Wati</i> NIP : <i>19830112 200012022</i>		

HASIL VERIFIKASI

Matrik Gender Analysis Pathway (GAP)

OPD

: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langka
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator K
PERBAIKAN GAP HASIL VERIFIKASI								
Program : Prog. Pengembangan Pemasaran Pariwisata Kegiatan: Pelaksanaan Festival Langkisau Tujuan: Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata	-Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang ada ± 120 orang -Jumlah Kunjungan Wisata pada 2 Tahun terakhir tahun 2017 sebanyak 2.350.000 wisatawan dan tahun 2018 sebanyak 2.479.841 wisatawan -Jumlah Destinasi Pariwisata yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 16 destinasi	Akses : -Lokasi berada di Kec.IV Jurai jadi Kec Lain yang ingin ikut harus menempuk jarak yang jauh -Keterbatasan informasi kegiatan Festival langkisau terhadap pelaku wisata dan Pelaku Ekonomi Kreatif Partisipasi: -Pelaku usaha yang berpartisipasi masih sedikit -Belum serhua pelaku usaha mampu dan siap dalam mempromosikan produk -Pelaku usaha yang ikut serta secara mandiri di dominasi oleh pelaku usaha skala besar -Peserta Festival Langkisau belum mampu mengelola stand dengan optimal	-Keterbatasan kewenangan OPD terkait dalam menentukan lokasi festival yang ideal. -Pengelola kegiatan belum memanfaatkan media informasi secara optimal. -Belum dilakukan evaluasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan secara menyeluruh	-Kelayakan Lokasi dalam menampung peserta dan pengunjung Festival belum terpenuhi -Keterbatasan anggaran pelaku usaha untuk menyewa stand -Keterbatasan kemampuan SDM peserta Festival Langkisau dalam mempromosikan produk	Meningkatnya penyebaran informasi promosi dan iklim invetasi serta daya saing produksi Kabupaten Pesisir Selatan. Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata	1.Sosialisasi Festival Langkisau terhadap pelaku wisata dan pelaku ekonomi kreatif. 2.Penyebaran informasi melalui media cetak, media elektronik dan sosial media 3.Festival Langkisau tahun 2020	-Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang ada ± 120 orang -Jumlah Kunjungan Wisata pada 2 Tahun terakhir tahun 2017 sebanyak 2.350.000 wisatawan dan tahun 2018 sebanyak 2.479.841 wisatawan -Jumlah Destinasi Pariwisata yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 16 destinasi	Kegiatan 1: Festival L 2020 Input : Rp.450.000.0 Ouput: Terlaksananya Langkisau 20 Outcome: Meningkatnya kunjungan sekitar 10 (%)

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base- Line)	Indikator Kinerja
		Kontrol: - Penentuan pelaku usaha ditentukan oleh pemerintah daerah Manfaat: - Tidak semua pelaku home industri siap dalam kualitas dan kuantitas produk yang di minta calon buyer. - Manfaat langsung terkait dengan pelaksanaan Festival Langkisau belum bisa di rasakan oleh pelaku wisata dan Ekonomi kreatif						

Painan, 21 Juni 2019

Kepala OPD Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga,



HASIL VERIFIKASI

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator G
PERBAIKAN GAP SETELAH VERIFIKASI								
Program : Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Kegiatan : Pemilihan Uda Uni Duta Wisata Kabupaten Pesisir Selatan 2020 Tujuan : Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisata	- Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang ada ± 120 orang - Jumlah Kunjungan Wisata pada 2 Tahun terakhir tahun 2017 sebanyak 2.350.000 wisatawan dan tahun 2018 sebanyak 2.479.841 wisatawan - Jumlah Destinasi Pariwisata yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 16 destinasi - Jumlah peserta Uda Uni yang mengikuti seleksi setiap tahun ± 100 orang - Jumlah peserta Uda Uni yang telah mengikuti	1). Akses : • Minimnya sosialisasi sehingga menyebabkan sedikitnya peserta • Keikutsertaan peserta yang terdiri dari mahasiswa dan pelajar memprsulit mereka dalam hal pembiayaan dan waktu karena seleksi diadakan di Kabupaten 2). Partisipasi • Belum banyak peminat untuk ikut serta dalam Pemilihan Uda Uni karena Sosialisasi yang kurang • Keterbatasan dalam hal pengetahuan tentang pariwisata .	- Belum maksimal koordinasi dengan instansi terkait - Belum adanya kebijakan Pemerintah paska uda uni terpilih	- Kurangnya minat pemuda pemudi untuk mengikuti ajang pemilihan uda uni - Belum semua Pemuda-pemudi yang paham tentang pariwisata	- Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisata - Memberikan kesempatan kepada generasi muda dalam mengembangkan bakat yang di miliki.	1. Sosialisasi Pemilihan Uda Uni Duta Wisata Pesisir Selatan terhadap pemuda dan pemudi di Kabupaten Pesisir Selatan 2. Penyebaran informasi melalui media cetak, media elektronik dan sosial media 3. Pelaksanaan Pemilihan Uda Uni Duta Wisata Kabupaten	- Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang ada ± 120 orang - Jumlah Kunjungan Wisata pada 2 Tahun terakhir tahun 2017 sebanyak 2.350.000 wisatawan dan tahun 2018 sebanyak 2.479.841 wisatawan - Jumlah Destinasi Pariwisata yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 16 destinasi - Jumlah peserta Uda Uni yang mengikuti seleksi setiap tahun ± 100 orang - Jumlah peserta Uda	Input : 350.000.000 Output : Terlaksananya Uda dan Uni Duta Kabupaten Pesisir Tahun 2020 Outcome : Uda dan Uni nantinya akan mempromosikan wisata yang Kabupaten Pesisir guna meningkatkan kunjungan wisatawan yang datang ke Kabupaten Pesisir

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base- Line)	Indikator G
	setiap tahun 60 orang	3). Kontrol : - Masih kurangnya referensi pemuda- pemudi dalam pariwisata khususnya Kab. Pesisir Selatan 4). Manfaat : - Rasa ingin bersaing masih kurang - Penerapan ilmu yang dimiliki oleh peserta belum maksimal karena fasilitas komunikasi masih lemah				Pesisir Selatan Tahun 2020 4. Mengikutsertakan para peserta dalam mempromosikan Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan 5. Memberikan Apresiasi Kepada Para Peserta Uda Uni Kabupaten Pesisir Selatan	Uni yang telah mengikuti setiap tahun 60 orang	

Painan, 21 Juni 2019

Kepala OPD Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga,



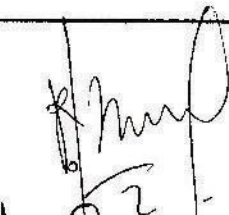
Hadi Susilo, S.STP, M.Si
NIP. 19770522 199703 1 001

**SARAN VERIFIKASI GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) DAN GENDER BADGET STATEMENT (GBS)
KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2020**

Instansi : DINAS PENDIDIKAN

Kegiatan : 1. Pembangunan Sarana Air Bersih & Sanitasi
2. Bimtek Peningkatan Kompetensi Guru SD

Tanggal : 21 Juni 2019

No	Tim Driver PPRG	Tanda Tangan	Keterangan
1	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Nama : NIP :		
2	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Nama : Rahmiyetti Idrees NIP : 19660819 1992 2 007		
3	Inspektorat Nama : IRTA WULIA NIP :		
4	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Nama : Irnawati NIP : 1980112 201001 2 022		

FORMAT GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESIR SELATAN

Hasil Verifikasi

LANGKAH 1	LANGKAH 2	LANGKAH 3	Isu Gender		LANGKAH 5	LANGKAH 6	LANGKAH 7	LANGKAH 8		LANGKAH 9
Kebijakan / Program / Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Baseline)	Pengukuran Hasil	Indikator Gender	
Program : Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Data terpilih : Jumlah Sekolah SD : 392	Akses - Belum seluruh sekolah mendapatkan akses sarana air bersih dan sarana sanitasi	*Kurangnya pemahaman persoalan gender bagi pengambilan kebijakan khususnya terhadap kebutuhan sarana air bersih dan sanitasi (WC) bagi siswa perempuan dan laki-laki	Sebagian kepala sekolah belum melaporkan/men gusulkan akan kebutuhan sarana air bersih dan sanitasi yang responsif gender	Seluruh siswa SD di Kabupaten Pesisir Selatan mendapatkan Akses Air Bersih dan Sanitasi Lingkungan yang baik yang responsif gender	-Pembangunan sarana air bersih dan sarana sanitasi di seluruh sekolah	Jumlah Sekolah SD : 392	Input : Dana : Rp.100.000.000,-		
Kegiatan : Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi	Jumlah Siswa : 57.200 Siswa SD Laki-laki : 29.862 Siswa SD Perempuan : 27.338	Partisipasi : Masih kurangnya partisipasi siswa dalam menjaga pemanfaatan sarana air bersih dan sanitasi	Kurangnya pemahaman kepala sekolah dan guru tentang persoalan gender	-Sosialisasi ke pada kepala sekolah tentang kesetaraan gender dalam pengadaan sarana dan prasarana sekolah, khususnya sanitasi/wc	Jumlah Siswa : Siswa SD Laki-laki : 29.862, Siswa SD Perempuan : 27.338	Output : Kebutuhan air bersih dan Sanitasi: siswa laki-laki : 189 unit WC, siswa perempuan : 233 unit WC Outcome: Terpenuhinya Kebutuhan Sanitasi dan air bersih seluruh siswa baik siswa laki-laki maupun perempuan	Hasil : Tersedianya sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi yang layak			
Tujuan : Meningkatkan Sarana Air bersih dan sanitasi yang seimbang antara laki-laki da perempuan	Jumlah SD yang telah mendapatkan sarana air bersih & sanitasi: 422 unit , WC laki-laki = 189 unit dan WC Perempuan = 233 unit	Manfaat : Fasilitas air bersih dan sanitasi yang tersedia belum memenuhi kebutuhan siswa				-Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi SD	WC laki-laki = 189 unit, WC Perempuan = 233 unit			

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,



FORMAT GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Hasil Verifikasi

LANGKAH 1	LANGKAH 2	LANGKAH 3	LANGKAH 4		LANGKAH 5	LANGKAH 6	LANGKAH 7	LANGKAH 8	LANGKAH 9
Kebijakan / Program / Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Faktor Kesenjangan	Isu Gender		Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Baseline)	Indikator Gender
Program : Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Data terpilih : Jumlah pendidik yang mengikuti bimtek : 400 org Jumlah Peserta : Guru Laki-laki : 83 org, Guru Perempuan : 317	Akses : Sebagian besar Guru SD yang akan melatih peserta siswa OSN belum mengikuti Bimtek	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal		Meningkatkan kompetensi guru dalam persiapan pembinaan siswa peserta lomba OSN tingkat kecamatan dan kabupaten	Melaksanakan bimtek bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	Jumlah pendidik yang mengikuti bimtek : 400 org Jumlah Peserta : Guru Laki-laki : 83 org Guru Perempuan : Jumlah Guru SD di Kab .Pessel = 5.457	Input : Dana : Rp. 427.618.700 Output : Terlatihnya tenaga pendidik tahun 2020, Guru perempuan : 317 org, dan guru laki-laki : 83 org Outcome: Meningkatnya kualitas guru sebagai pembina dalam persiapan peserta lomba siswa OSN tingkat kecamatan dan kabupaten Hasil : Meningkatnya kualitas guru sebagai pembina dalam persiapan peserta lomba siswa OSN tingkat kecamatan dan kabupaten
Kegiatan : Bimtek Peningkatan Kompetensi Guru SD	Jumlah Guru SD di Kab .Pessel = 5.457	Partisipasi : Masih ada Guru SD dalam mendampingi peserta OSN yang belum maksimal	- Pimpinan dalam pemerataan penempatan guru masih kurang optimal; - Belum menjadi skala prioritas kegiatan	Terbatasnya kemampuan Akademis Guru dalam membimbing siswa peserta OSN					
Tujuan Kegiatan : Meningkatkan kompetensi guru dalam persiapan pembinaan siswa peserta lomba OSN tingkat kecamatan dan kabupaten	Jumlah Guru SD yang belum mengikuti Bimtek = 5.057	Kontrol : kurangnya fasilitas dari Dinas untuk melaksanakan bimtek Manfaat : Belum maksimalnya Guru SD dalam menerima pelatihan bimtek untuk mendampingi anak							

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,

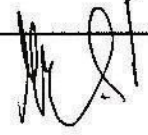
SUHENDRI S. Pd. M. Si
NIP. 196707231995121001


**LEMBARAN VERIFIKASI GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAB) DAN GENDER BADGET STATEMENT (GBS)
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020**

Instansi : DWAS LINGKUNGAN HIDUP

Kegiatan : 1. Pelatihan Keterampilan Pengelolaan Sampah (3R)
2. Pengelolaan Bank Sampah

Tanggal : 21 Juni 2019

No	Tim Driver PPRG	Tanda Tangan	Keterangan
1	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Nama : Syahrul NIP :		
2	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Nama : Rahmiyehi Idrus NIP : 19660819 199203 2007		
3	Inspektorat Nama : I. IRMA LULIA NIP :		
4	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Nama : Inawati NIP : 19830112 201001 2020		

HASIL VERIFIKASI

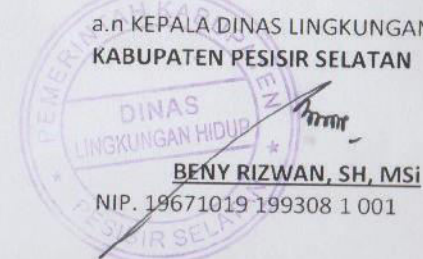
MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PESIR SELATAN

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan Pelatihan Keterampilan pengelolaan sampah 3R (reuse/mengguna kan kembali , recycle/daur ulang, reduce/menguran gi sampah)	Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Jumlah Kelompok Pengelola sampah di Kabupaten Pesisir Selatan: 3 Kelompok Alat-alat pengelolaan sampah yang sudah ada : Pencacah Sampah Organik dan Pengayak	Akses : - Masih rendahnya kelompok kerja yang terlatih. - Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang 3R (reuse/menggunakan kembali , recycle/daur ulang, reduce/mengurangi sampah) Partisipasi : - Rendahnya partisipasi masyarakat dalam memahami pentingnya 3R (reuse/menggunakan kembali recycle/daur ulang,	Belum menjadi prioritas kegiatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah masih kurang	Masih rendahnya pemahaman masyarakat akan arti pentingnya pengelolaan sampah dalam menambah ekonomi keluarga.	Terbukanya Kelompok Kerja pengelolaan Sampah dalam menambah pendapatan keluarga	Kegiatan - Sosialisasi tentang Pengelolaan Sampah -Pelatihan Keterampilan Pengelolaan Sampah 3R 3R (reuse/menggunaka n kembali , recycle/daur ulang, reduce/mengurangi sampah)	Jumlah Kelompok Pengelola sampah di Kabupaten Pesisir Selatan: 3 Kelompok Alat-alat pengelolaan sampah yang sudah ada: Pencacah Sampah Organik dan Pengayak Jumlah rumah Tangga dikabupaten pesisir selatan: 105.394 Jumlah pasar di Kabupaten Pesisir Selatan : 10 Pasar kabupaten	Input Rp. 50.000.000 Output : Jumlah P yang men pelatihan keterampilan pengelolaan sampah sebanyak 35 o Outcame Jumlah p yang terlatih pengelolaan sampah sebanyak 35 o

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Kinerja
Tujuan : Terbukanya Kelompok Kerja pengelolaan Sampah dalam menambah pendapatan keluarga	Jumlah rumah Tangga kabupaten pesisir selatan: 105.394 Jumlah pasar di Kabupaten Pesisir Selatan : 10 Pasar kabupaten Jumlah Sekolah di Kabupaten Pesisir Selatan: 707 sekolah	reduce/mengurangi sampah) Kontrol : - Belum jelasnya pemasaran hasil Pengelolaan Sampah 3R yang dilakukan. Manfaat : -Sampah yang ada belum dikelola dengan maksimal					Jumlah Sekolah di Kabupaten Pesisir Selatan: 707 sekolah	

a.n KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PESISIR SELATAN



BENY RIZWAN, SH, MSI

NIP. 19671019 199308 1 001

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PESISIR SELATAN

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Gender
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan Pengelolaan Bank Sampah/pusat Daur ulang Sampah dan Rumah Pengomposan Tujuan : Wadah tempat pengolahan Sampah an organik.	- Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah 1 buah bank sampah induk. 8 buah bank sampah. 5 - 15 orang Jumlah personil pengelola bank sampah	Akses : - Masyarakat belum memahami fungsi dan manfaat dari Bank Sampah. - Kerja sama antara masyarakat dengan pengelola bank sampah belum terjalin dengan baik. Partisipasi : Partisipasi masyarakat masih rendah dalam memanfaatkan kerja sama dengan pengelola bank sampah. Kontrol : - Belum jelasnya pemasaran hasil Bank Sampah Manfaat : - Bank sampah belum memberikan kontribusi yang maksimal	- Belum menjadi prioritas kegiatan - Belum terpenuhinya kebutuhan bank sampah oleh pemerintah di setiap kecamatan atau pasar. - Masih kurangnya Sosialisasi tentang manfaat bank sampah	- Kesulitan dalam menentukan Lokasi Bank Sampah/pusat daur ulang sampah dan rumah pengomposan. - Kurangnya pemahaman manfaat pengolahan sampah melalui Bank Sampah/pusat daur ulang sampah dan rumah pengomposan.	Wadah tempat pengolahan sampah organik.	- Sosialisasi pemanfaatan Bank Sampah/pusat daur ulang sampah dan rumah pengomposan ke masyarakat. - Usulan DAK ke pusat dilengkapi dengan DED dan Kajian lingkungan.	1 buah bank sampah induk. 8 buah bank sampah. 5 - 15 orang Jumlah personil pengelola bank sampah	Input Rp. 2.000.000.000 Output Tersedianya 1 unit Bank Sampah/pusat daur ulang sampah dan rumah pengomposan. Outcome : Terkendalinya pencemaran lingkungan sampah an organik.

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Gender
		terhadap kesejahteraan masyarakat.		bagi masyarakat				

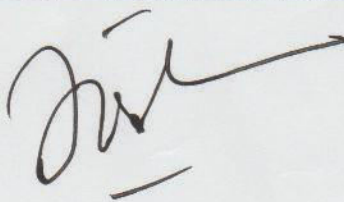
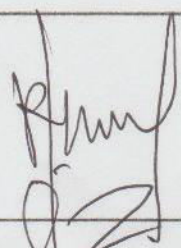
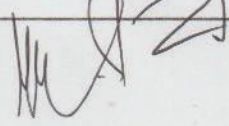
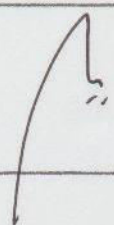
a.n KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Sekretaris

 *mmf*

BENY RIZWAN, SH, MSI
NIP. 19671019 199308 1 001

**LEMBARAN VERIFIKASI GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAB) DAN GENDER BADGET STATEMENT (GBS)
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020**

Instansi : Dinas Perhubungan
 Kegiatan : 1. Pengadaan dan Pemasangan Alat Keelamatan Lalin.
 2. Pembangunan Penstrangan Jalan Umum.
 Tanggal : 21 Juni 2019.

No	Tim Driver PPRG	Tanda Tangan	Keterangan
1	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Nama : Syahrul NIP :		
2	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Nama : Rahmiyethi Laroy NIP : 19660819 199203 2007		
3	Inspektorat Nama : I. IRMA YULIA NIP :		
4	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Nama : Irnawati NIP : 19830112 201001 2022		

Matrik Gender Analysis Pathway (GAP)

Hasil Verifikasi
 SKPD : Dinas Perhubungan
 Tahun : 2020

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
PROGRAM : Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas KEGIATAN: Pengadaan dan Pemasangan Alat Keselamatan Lalu Lintas TUJUAN: Menurunkan angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Pesisir Selatan	1. Peraturaturan Menteri Perhubungan No. 13 tahun 2014 Tentang Rambu lalu Lintas 2. Jumlah Rambu- rambu lalu lintas : 948 buah 3. Warning light 5 buah 4. Traffic light 4 buah 5. Guard rail 5 paket 6. Jumlah kendaraan di Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 104.388 Unit 7. Jumlah kecelakaan lalu lintas 2 tahun terakhir a. 2017 (265 Kasus) b. 2018 (298 Kasus) 8. Jumlah pelanggaran lalu lintas 2 tahun terakhir a. 2017 (3.898 Kasus) b. 2018 (3.966 Kasus) 9. Jumlah sekolah yang rawan kecelakaan 15 sekolah (4 Sekolah Prioritas)	<u>Akses:</u> - Masih diperlukan pengadaan tambahan alat keselamatan lalu lintas. <u>Partisipasi :</u> - Masih banyaknya pengguna jalan yang tidak memahami fungsi alat keselamatan lalu lintas <u>Kontrol</u> - Kurang pengawasan pemerintah terhadap alat keselamatan yang sudah terpasang <u>Manfaat</u> - Seringnya terjadi kecelakaan di lokasi yang belum terpasang alat keselamatan lalu lintas	- Belum menjadi skala prioritas kegiatan terhadap pengadaan alat keselamatan lalu lintas. - Banyaknya rambu lalu lintas yang sudah rusak dan belum diganti. - Belum adanya Zona selamat Sekolah dan Rute Selamat Sekolah	Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap alat keselamatan lalu lintas. Belum terpenuhi permintaan alat keselamatan lalu lintas pada saat pelaksanaan Musrenbang	Menurunkan angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Pesisir Selatan	- Survey Lokasi Pemasangan Alat Keselamatan - Perencanaan Pengadaan Alat Keselamatan lain - Pelaksanaan Pengadaan dan Pemasangan Alat Keselamatan Lalu Lintas Sebanyak a. Rambu - rambu lalu lintas sebanyak 200 buah b. Guard Rail 22 Buah c. Paku Jalan 2000 Buah d. Marka Jalan 8000 Meter e. Warning Light 18 Buah f. Zona Selamat Sekolah 4 Paket	1. Jumlah Rambu- rambu lalu lintas : 948 buah 2. Warning light 5 buah 3. Traffic light 4 buah 4. Guard rail 5 paket 5. Jumlah kendaraan di Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 104.388 Unit 6. Jumlah kecelakaan lalu lintas 2 tahun terakhir c. 2017 (265 Kasus) d. 2018 (298 Kasus) 7. Jumlah pelanggaran lalu lintas tahun a. 2017 (3.898 Kasus) b. 2018 (3.966 Kasus)	Input : Rp. 2.879.400.000, Output : Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Alat Keselamatan Lalu Lintas berupa : a. Rambu - rambu lalu lintas sebanyak 200 buah b. Guard Rail 22 Buah c. Paku Jalan 2000 Buah d. Marka Jalan 8000 Meter e. Warning Light 18 Buah

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
							8. Jumlah sekolah yang rawan kecelakaan 15 sekolah (4 Sekolah Prioritas)	f. Zona Selamat Sekolah 4 Paket Outcome : Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Pesisir Selatan

Painan, 24 Juni 2019

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESIR SELATAN

Matrik Gender Analysis Pathway (GAP)

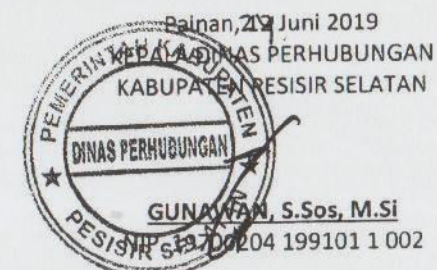
HASIL VERIFIKASI

SKPD : Dinas Perhubungan

Tahun : 2020

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
PROGRAM : Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas KEGIATAN: Pembangunan Penerangan Jalan Umum TUJUAN: Meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi pengguna jalan dan masyarakat	- Penerangan jalan umum yang telah terpasang sebanyak 283 ID Pel - Panjang jalan di Kabupaten Pesisir Selatan - Jalan Nasional 223,50 Kilometer - Jalan Propinsi 67,90 Kilometer - Jalan Kabupaten 2.323,38 Kilometer	<u>Akses:</u> Belum meratanya pembangunan penerangan jalan umum di Kabupaten Pesisir Selatan <u>Partisipasi:</u> Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga penerangan jalan umum yang tersedia. <u>Kontrol:</u> Masih kurangnya pengawasan terhadap penerangan jalan umum yang telah terpasang <u>Manfaat:</u> Belum seluruhnya masyarakat yang mendapat manfaat dari Penerangan jalan umum	- Tidak terakomodirnya seluruh permintaan masyarakat akan penerangan jalan umum - Tidak tersedianya SDM aparatur Dinas Perhubungan pada bagian Penerangan Jalan umum - Tidak Tersedianya Titik Koordinat penerangan jalan umum yang telah terpasang.	Banyaknya permintaan masyarakat akan penerangan jalan umum Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga penerangan jalan umum	Meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi pengguna jalan dan masyarakat.	Membangun penerangan jalan umum pada titik koordinat yang telah ditentukan	- Penerangan jalan umum yang telah terpasang sebanyak 283 ID Pel - Panjang jalan di Kabupaten Pesisir Selatan - Jalan Nasional 223,50 Kilometer - Jalan Propinsi 67,90 Kilometer - Jalan Kabupaten 2.323,38 Kilometer	Input : Rp. 5.000.000.000,- Output : Tersedianya PJU sebanyak 23 paket Outcome : Meningkatnya rasa aman dan nyaman bagi pengguna jalan dan masyarakat

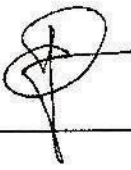
Palman, 29 Juni 2019



**LEMBARAN VERIFIKASI GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAB) DAN GENDER BADGET STATEMENT (GBS)
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020**

Instansi : Badan Pendapatan
Kegiatan : Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Gedung Kantor

Tanggal : 30 - 6 - 2019

No	Tim Driver PPRG	Tanda Tangan	Keterangan
1	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Nama : Zuhairu NIP : 196603051992031000		
2	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Nama : DESRI LAJUMIDARTI, SPt NIP : 19731224 200801 2 006		
3	Inspektorat Nama : YEFRIAL, ST, MM NIP : 19671020 198003 1 007		
4	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Nama : NESVITA 24RA.S.B.M.S NIP : 19820706 200501 2 010		

HASIL VERIFIKASI

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama an/Program/K giatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator G
n : atan Saran sarana n : tasi Berat Rumah Kantor ya : atnya nilai n masyarakat	- Jumlah Wajib Pajak di Kabupaten Pessel tahun 2018 terdiri dari: 172.000 NOP PBB-P2 dan 3000 NPWPD yang merupakan dari Wajib Pajak Perorangan, Perusahaan, Rumah makan, Hotel, Pajak hiburan, dan pajak reklame - Dalam rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Badan Pendapatan mempunyai peranan penting dalam hal Pelayanan Publik. - Untuk terciptanya kualitas Pelayanan dan terciptanya Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar kebutuhan dibutuhkan prasarana	AKSES - Belum tersedianya sarana dan prasarana pelayanan pajak yang memadai untuk masyarakat terutama Ibu menyusui. PARTISIPASI - Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan pajak untuk kaum perempuan yang menyebabkan telat bayar. KONTROL - Kurang tersediaanya anggaran sehingga anggaran lebih memprioritaskan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.	Keterbatas anggaran sehingga pembangunan sarana dan prasarana belum menjadi kegiatan Prioritas	Karena sarana dan prasarana atau ruangan Ibu menyusui menyebabkan Wajib Pajak yang menyusui kurang nyaman untuk melakukan pembayaran pajak.	Meningkatnya nilai Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak	- Penambahan Sarana dan prasarana untuk wajib pajak - Penambahan ruang untuk ibu menyusui	- Jumlah Wajib Pajak di Kabupaten Pessel tahun 2018 terdiri dari: 172.000 NOP PBB-P2 dan 3000 NPWPD merupakan dari Wajib Pajak Perorangan, Perusahaan, Rumah makan, Hotel, Pajak hiburan, dan pajak reklame - rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Badan Pendapatan mempunyai peranan penting dalam hal Pelayanan Publik. - Untuk terciptanya kualitas Pelayanan dan terciptanya Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar kebutuhan dibutuhkan prasarana kantor yang representatif.	Input : Rp.150.000.0 Output: Tersedianya Ibu Menyusui Outcome : Meningkatnya kepuasan masyarakat pelayanan yang Gender

	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
m/K	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Gender
	kantor yang representatif. ❖ Pengunjung wajib pajak perempuan usia subur yang memiliki batita						❖ Pengunjung wajib pajak perempuan usia subur yang memiliki batita	

Painan, 20 Juni 2019
 Kepala Badan Pendapatan
 Kabupaten Pesisir Selatan



DASRIANTO PUTRA, S.Sos. M.Si
 NIP. 19731230 199403 1 003